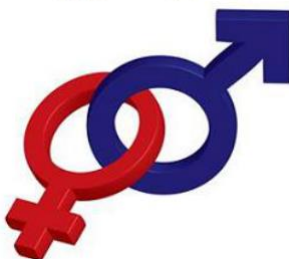
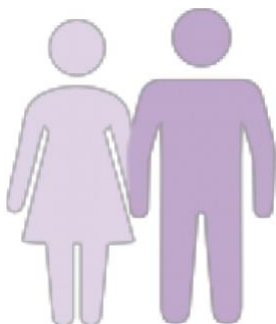




DATA GENDER DAN ANAK

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2022



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANTUL**

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Puji Syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan rahmat dan anugerahnya sehingga penyusunan Data Pilah Gender & Anak Tahun 2022 ini dapat terwujud dan berjalan dengan baik. Kami berkomitmen untuk membuat *update* setiap tahun sebagai komitmen kami untuk mewujudkan Kabupaten Bantul yang responsif gender dan anak.

Buku Data Pilah Gender & Anak Tahun 2022 ini kami susun pada bulan Oktober Tahun 2022. Selain itu Data Pilah Gender Dan Anak ini kami lengkapi dengan analisis gender untuk memudahkan dalam memahami data. Harapan kami data pilah gender dan anak ini dapat menjadi salah satu panduan bagi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Bantul, maupun lembaga dan organisasi mitra OPD Kabupaten Bantul, serta berbagai pihak sebagai data dasar dan pembuka wawasan untuk pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, penyusunan program maupun kegiatan serta anggaran pembangunan yang responsif gender & anak sesuai dengan arah pembangunan yang berkelanjutan.

Terimakasih dan syukur kami ucapkan kepada seluruh pihak yang mendukung ketersediaan data serta terselenggaranya Buku Data Pilah Gender & Anak Tahun 2022 ini. Semoga Buku Data Pilah Gender & Anak Tahun 2022 ini mampu memberikan kontribusi pada perencanaan dan penganggaran Kabupaten Bantul yang semakin responsif Gender & Anak.

Namun demikian kami menyadari bahwa Buku Data Pilah Gender & Anak Tahun 2022 ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu kami sangat terbuka terhadap segala bentuk masukan-masukan yang membangun untuk perbaikan penyelenggaraan Buku Data Pilah Gender & Anak berikutnya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Bantul, 10 Oktober 2022



Dra. Ninik Istijarini, Apt., MPH
NIP. 1966032019996032002

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	viii
BAB I	
DATA UMUM	1
A. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur & Jenis Kelamin	
.....	1
B. Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin	5
C. Rumah Tangga Miskin	7
D. Indeks Pembangunan	8
BAB II	
DATA STATISTIK BIDANG KESEHATAN	11
A. Jumlah Kematian Ibu	11
B. Penyebab Kematian Ibu	12
C. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	14
D. Penderita HIV/ AIDS	15
E. Peserta Keluarga Berencana	16
F. Usia Perkawinan	18
G. Dispensasi Nikah	19
H. Pernikahan Dini	19
BAB III	
DATA DAN STATISTIK BIDANG PENDIDIKAN	21
A. Angka Melek Huruf Usia 15 – 24 Tahun	21
B. Angka Partisipasi Kasar (APK)	23

C.	Partisipasi Sekolah (APS)	Angka	24
D.	Partisipasi Murni	Angka	25
E.	Putus Sekolah	Angka	27
F.	Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi	Penduduk	28
BAB IV			
DATA DAN STATISTIK EKONOMI KETENAGAKERJAAN			30
A.	Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat	30
B.	Tenaga Kerja Migran	Jumlah	32
C.	Sektor Formal	Pekerja di	33
D.	Sektor Informal	Pekerja di	35
E.	Pengangguran Terbuka	Angka	36

		F.
		Keanggotaan
		37
G.	n Koperasi	Pekerja Tak
	Dibayar (<i>unpaid worker</i>)	38
BAB V		
DATA DAN STATISTIK BIDANG POLITIK		
DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN40		
A.		Partisipasi
	Lembaga Legislatif	41
B.		Partisipasi
	di Lembaga Penegak Hukum	42
C.		Pejabat
	Struktural	44
D.		Pengurus
	Harian Parpol	46
E.		Pejabat
	Camat, Kepala Desa/Lurah Kabupaten Bantul	48
F.		Tim Penilai
	Kerja	48
G.		Anggota
	BPD (Badan Permusyawaratan Desa)	50
BAB VI		
DATA DAN STATISTIK BIDANG HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA52		
A.		Penghuni
	Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)	52
B.		Penduduk
	Lanjut Usia (Lansia) Terlantar	53
		C.
	g Disabilitas	Penyandang
		53
BAB VII		
DATA DAN STATISTIK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN		
DAN ANAK56		
A.		Jumlah
	Kekerasan Menurut Jenis Kelamin	56

B.	Korban Kekerasan Menurut Umur	Jumlah	57
C.	Kekerasan Menurut Pendidikan	Jumlah	59
D.	Kekerasan Menurut Jenis Kekerasan	Jumlah	60

BAB VIII

DATA DAN STATISTIK ANAK	62
--------------------------------------	-----------

A.	Korban Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah	62
B.	Anak Jalanan	Jumlah	63
C.	Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	Jumlah	64
D.	yang Memperoleh Beasiswa	Anak Miskin	65

Daftar Tabel

Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur & Jenis Kelamin Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021	2
Tabel 2 Jumlah Kepala Keluarga Berdasar Jenis Kelamin Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021	6
Tabel 3 Rumah Tangga Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021.....	7
Tabel 4 Indeks Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021.....	8
Tabel 5 Jumlah Kematian Ibu Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021.....	12
Tabel 6 Penyebab Kematian Ibu Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021.....	13
Tabel 7 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021.....	15
Tabel 8 Penderita HIV/ AIDS Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021.....	16
Tabel 9 Peserta Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021.....	17
Tabel 10 Usia Perkawinan Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021.....	18
Tabel 11 Pernikahan Dini di Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021.....	20
Tabel 12 Presentase Angka Melek Huruf Usia 15 – 24 Tahun Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021	22
Tabel 13 Angka Partisipasi Kasar Sekolah Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021.....	23
Tabel 14 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021.....	24
Tabel 15 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021.....	26
Tabel 16 Angka Putus Sekolah Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021.....	27
Tabel 17 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi yang Ditatamkan Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021	28
Tabel 18 Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten	

Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021	31
Tabel 19 Jumlah Tenaga Kerja Migran Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021.....	32
Tabel 20 Pekerja Sektor Formal Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021.....	34
Tabel 21 Pekerja Sektor Informal Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021.....	35
Tabel 22 Angka Pengangguran Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021.....	36
Tabel 23 Keanggotaan Koperasi Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021.....	37
Tabel 24 Pekerja Tak Dibayar (<i>unpaid worker</i>) Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021	38
Tabel 25 Partisipasi di Lembaga Legislatif Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021.....	41
Tabel 26 Partisipasi di Lembaga Penegak Hukum Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021	43
Tabel 27 Pejabat Struktural Berdasarkan Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019 - 2020 - 2021	45
Tabel 28 Pengurus Harian Parpol Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021.....	47
Tabel 29 Pejabat Camat, Kepala Desa/Lurah Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021	48
Tabel 30 Tim Penilai Kerja Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021.....	49
Tabel 31 Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021	50
Tabel 32 Penghuni Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021	52
Tabel 33 Penduduk Lanjut Usia (Lansia) Terlantar Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021	53
Tabel 34 Penyandang Disabilitas Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021.....	54
Tabel 35 Jumlah Kekerasan Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021	56
Tabel 36 Jumlah Korban Kekerasan Menurut Umur Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021	57
Tabel 37 Jumlah Kekerasan Menurut Pendidikan Kabupaten Bantul	

	Tahun 2019 - 2020 - 2021	59
Tabel 38 Jumlah Kekerasan Menurut Jenis Kekerasan Kabupaten Bantul	Tahun 2019 - 2020 - 2021	60
Tabel 39 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Kabupaten Bantul	Tahun 2019 - 2020 - 2021	62
Tabel 40 Anak Jalanan Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021		63
Tabel 41 Jumlah Anak Dengan Kedisabilitasn Kabupaten Bantul	Tahun 2019 - 2020 - 2021	64

Daftar Gambar

Gambar 1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur & Jenis Kelamin Kabupaten Bantul Tahun 2019	3
Gambar 2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur & Jenis Kelamin Kabupaten Bantul Tahun 2020	3
Gambar 3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur & Jenis Kelamin Kabupaten Bantul Tahun 2021	4
Gambar 4 Jumlah Kepala Keluarga Berdasar Jenis Kelamin Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021	7
Gambar 5 Rumah Tangga Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021.....	8
Gambar 6 Indeks Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021.....	9
Gambar 7 Jumlah Kematian Ibu Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2020 - 2021.....	12
Gambar 8 Penyebab Kematian Ibu Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021.....	14
Gambar 9 Penderita HIV/ AIDS Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021.....	16
Gambar 10 Peserta Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021.....	17
Gambar 11 Usia Perkawinan Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021.....	19
Gambar 12 Pernikahan Dini di Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021.....	20
Gambar 13 Presentase Angka Melek Huruf Usia 15 – 24 Tahun Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021	22
Gambar 14 Angka Partisipasi Kasar Sekolah Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021	24
Gambar 15 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021.....	25
Gambar 16 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021.....	26
Gambar 17 Angka Putus Sekolah Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021.....	27
Gambar 18 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi	

yang Ditamatkan Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021	29
Gambar 19 Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021	31
Gambar 20 Jumlah Tenaga Kerja Migran Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021.....	33
Gambar 21 Pekerja Sektor Formal Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021.....	34
Gambar 22 Pekerja Sektor Informal Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021.....	35
Gambar 23 Angka Pengangguran Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021.....	37
Gambar 24 Keanggotaan Koperasi Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021.....	38
Gambar 25 Pekerja Tak Dibayar (unpaid worker) Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021	39
Gambar 26 Partisipasi di Lembaga Legislatif Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021	42
Gambar 27.a Partisipasi di Lembaga Penegak Hukum: Jaksa dan Hakim Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021	43
Gambar 27.b Partisipasi di Lembaga Penegak Hukum: Kepolisian Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021	44
Gambar 28.a Partisipasi Perempuan sebagai Pejabat Struktural Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021	45
Gambar 28.b Partisipasi Perempuan sebagai Pejabat Fungsional Tertentu Kabupaten Bantul Tahun 2017 - 2018 - 2021	46
Gambar 29 Pengurus Harian Parpol Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021.....	47
Gambar 30 Pejabat Camat, Kepala Desa/Lurah Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021	48
Gambar 31 Tim Penilai Kerja Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021.....	50
Gambar 32 Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021	51
Gambar 33 Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021	52
Gambar 34 Penduduk Lanjut Usia (Lansia) Terlantar Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021	53

Gambar 35 Penyandang Disabilitas Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021.....	54
Gambar 36 Jumlah Kekerasan Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021	57
Gambar 37 Jumlah Korban Kekerasan Menurut Umur Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021	58
Gambar 38 Jumlah Kekerasan Menurut Pendidikan Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021	59
Gambar 39 Jumlah Kekerasan Menurut Jenis Kekerasan Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021	61
Gambar 40 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021	62
Gambar 41 Anak Jalanan Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021	64
Gambar 42 Jumlah Anak Dengan Kedisabilitasan Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021	65

BAB I DATA UMUM

Penduduk adalah sumber daya manusia yang dipunyai oleh suatu daerah. Penduduk adalah subyek sekaligus obyek pembangunan. Penduduk suatu daerah adalah sumber daya yang luar biasa untuk modal pembangunan sekaligus juga penerima manfaat pembangunan. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah modalitas yang tidak terbatas bagi pembangunan, sebaliknya yang tidak berkualitas akan menjadi beban pembangunan. Dengan demikian data terkait dengan SDM ini menjadi sangat vital mengingat data inilah yang kemudian menjadi tolok ukur pembangunan. Berkenaan dengan data terpilah ini sangat diperlukan untuk melihat lebih detail tentang potret Kabupaten Bantul terkait dengan isu-isu gender khususnya.

Data jumlah penduduk menjadi data dasar yang penting dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Semakin detail informasi dan data mengenai penduduk akan semakin baik untuk menentukan arah dan strategi pembangunan. Data jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin menjadi informasi dasar yang sangat penting dalam perencanaan dan pemenuhan kebutuhan dasar yang berperspektif gender dan anak. Data ini diperlukan agar pembangunan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan berdasarkan usia dan jenis kelaminnya sekaligus tepat guna. Masing-masing kelompok baik umur maupun jenis kelamin menunjukkan data yang berbeda dengan kebutuhan yang berbeda. Dengan adanya data ini maka akan memudahkan bagi setiap OPD untuk membuat program dan menentukan sasaran pembangunan khususnya untuk masyarakat.

A. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur & Jenis Kelamin

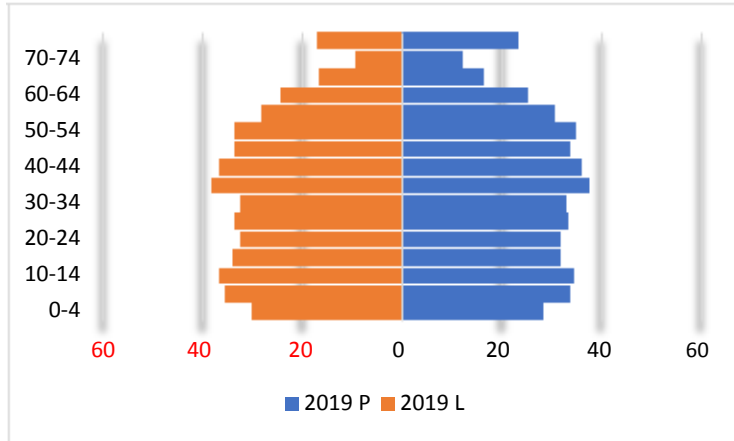
Jumlah penduduk Bantul tahun 2021 menunjukkan bahwa total penduduk Bantul 956,513 jiwa dengan penduduk laki-laki berjumlah 476,315 jiwa yaitu 49,80% dari total penduduk.

Sementara jumlah penduduk perempuan berjumlah 480,198 jiwa, sekitar 50,20% dari total penduduk. Dengan demikian dapat diketahui jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Komposisi penduduk dapat dilihat hampir berimbang antara penduduk laki-laki dan perempuan. Jumlah penduduk mengalami penambahan sebanyak 1.807 jiwa dengan persentase penduduk perempuan sedikit lebih banyak dari laki laki. Penambahan penduduk terlihat pada semua kelompok usia baik anak-anak, dewasa maupun tua, baik laki-laki maupun perempuan. Jumlah penduduk terbesar di kelompok usia 35-39 tahun dan usia 40 – 44 tahun, usia yang sangat produktif. Jumlah ini sangat nampak pada gambar piramida penduduk berikut.

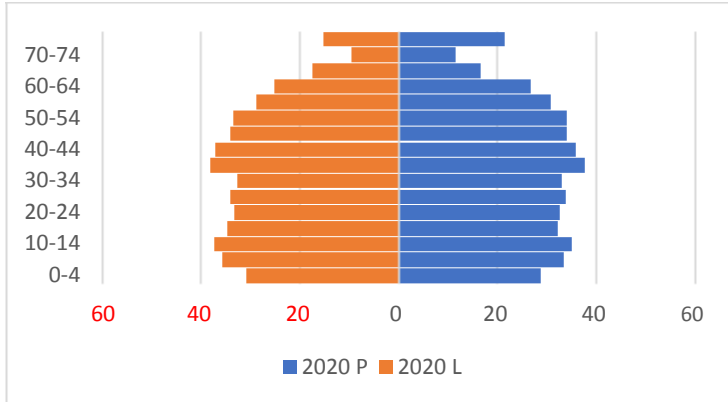
Tabel 1
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur & Jenis Kelamin
Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021

Kelompok Umur	2019			2020			2021		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
0-4	30,033	28,237	58,270	30,730	28,809	59,539	30,688	28,549	59,207
5-9	35,697	33,803	69,500	35,537	33,574	69,111	34,988	33,104	68,092
10-14	36,789	34,341	71,130	37,298	35,153	72,451	37,736	35,508	73,244
15-19	33,871	31,949	65,820	34,480	32,218	66,698	33,939	31,906	65,845
20-24	32,418	32,002	64,420	33,235	32,648	65,883	33,567	32,822	66,389
25-29	33,448	33,211	66,659	33,973	33,986	67,959	34,217	34,257	68,474
30-34	32,418	33,113	65,916	32,586	33,048	65,634	32,718	33,234	65,952
35-39	38,127	37,456	75,583	38,040	37,753	75,793	36,844	37,023	73,867
40-44	36,764	35,895	72,659	37,028	35,982	73,010	37,482	36,385	73,867
45-49	33,530	33,828	67,358	33,961	34,112	68,073	34,758	34,737	69,495
50-54	33,528	34,954	68,482	33,297	34,190	67,487	33,141	34,076	67,217
55-59	28,426	30,590	59,016	28,793	30,813	59,606	29,363	31,435	60,798
60-64	24,416	25,249	49,665	25,134	26,789	51,923	25,047	26,960	52,007
65-69	16,505	16,241	32,746	17,229	16,700	33,929	17,999	17,889	35,888
70-74	9,373	12,064	21,437	9,495	11,616	21,111	10,046	11,725	21,771
>75	17,188	23,476	40,664	15,055	21,444	36,499	13,812	20,588	34,400
Total	472,916	476,409	949,325	475,871	478,835	954,706	476,315	480,198	956,513

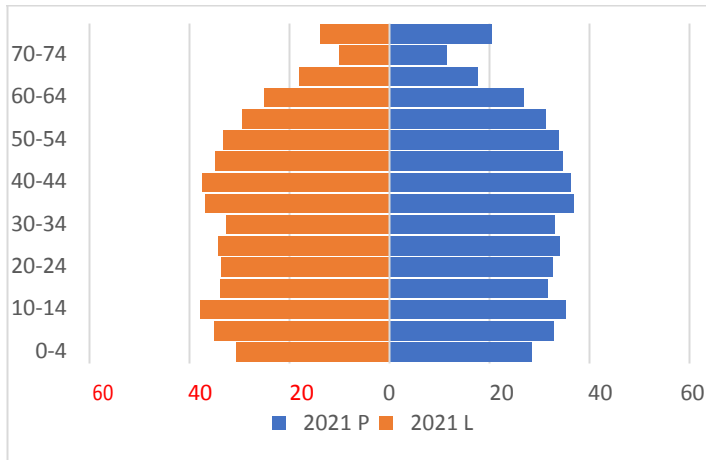
Sumber: Disdukcapil Kab. Bantul, 2021



Gambar 1
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur & Jenis Kelamin
Kabupaten Bantul Tahun 2019



Gambar 2
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur & Jenis Kelamin
Kabupaten Bantul Tahun 2020



Gambar 3
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur & Jenis Kelamin
Kabupaten Bantul Tahun 2021

Data di atas menunjukkan komposisi penduduk perempuan dan laki-laki pada dasarnya pada jumlah yang hampir berimbang. Dalam 3 tahun terakhir setidaknya menunjukkan di tahun 2019, 2020 dan 2021 sedikit lebih banyak penduduk perempuan. Hal menarik yang dapat dilihat dari data tersebut adalah jumlah penduduk laki-laki dari usia 0 hingga 50 tahun lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Namun di kelompok usia 51+ tahun ini justru penduduk perempuan yang lebih banyak. Kondisi ini sejalan dengan data harapan hidup perempuan yang lebih tinggi dibanding laki-laki. Secara umum, isu gender bidang kependudukan antara lain tingginya pertumbuhan jumlah penduduk usia tua terutama perempuan.

Dari tahun ke tahun jumlah kelompok usia 51+ tahun atau tergolong lansia baik laki-laki maupun perempuan memperlihatkan trend yang semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan semakin baik sehingga angka harapan hidup semakin tinggi. Kondisi ini mengisyaratkan pentingnya program untuk lansia. Program untuk memastikan lansia tetap produktif, sehat dan bahagia. Karena bila tidak ditangani dengan baik, kondisi ini meningkatkan risiko kesehatan karena penurunan fungsi faal tubuh, juga risiko meningkatnya jumlah penyandang disabilitas baru. Lansia tidak produktif juga berisiko pada meningkatnya proteksi sosial untuk menjamin agar lansia tidak produktif dan miskin dapat hidup selayaknya manusia. Kebijakan pembangunan kepada lansia berfokus pada upaya memastikan kehidupan yang layak dan sehat di usia tua.

Bila dicermati lebih dalam, percepatan peningkatan jumlah penduduk usia lanjut perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Hasil kajian Stefan Ek (2015) mengungkap bahwa perempuan memiliki rasa ingin tahu tentang kesehatan yang lebih tinggi, serta lebih memperhatikan barang yang mereka beli dibanding laki-laki. Sementara laki-laki dinilai lebih rentan terjangkit penyakit kronis seperti sirosis hati, jantung dan kanker (Waldron & Johnston, 2010). Hal ini bisa berkontribusi pada meningkatnya AHH perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Untuk itu penting bagi pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan keberpihakan pada upaya agar kelompok lanjut usia ini dapat menjalani hidup tuanya dengan sehat. Selain kebijakan kuratif untuk penanganan kelompok usia lanjut, upaya preventif yang mendorong agar warga DIY dapat mencapai usia lanjut dengan sehat harus dilakukan sejak dini. Promosi gaya hidup bersih dan sehat, mendorong kemampuan individu untuk memiliki daya saing, mampu beradaptasi dan memiliki daya lenting saat terjadi shock dilakukan sejak sebelum terjadinya kehamilan. Kampanye ini menyasar kepada kelompok muda usia dengan mempertimbangkan materi dan metodologi yang tepat, menarik, analitis dan kritis.

Dari data di atas juga menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak di semua umur kecuali 51 tahun ke atas. Hal ini menunjukkan usia harapan hidup perempuan lebih besar dari laki-laki. Dengan demikian dari data menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup laki-laki lebih rendah dibanding perempuan. Faktor lain bisa dilihat adalah data kesehatan dan juga data kematian. Pada usia ini diperlukan program khusus untuk meningkatkan angka harapan hidup laki-laki. Disamping itu data banyaknya perempuan pada usia non produktif dapat menjadi perhatian tersendiri akan program proteksi sosial seperti jaminan hari tua, akses dan partisipasi ekonomi. Hal ini sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan lansia khususnya.

B. Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

Definisi Kepala Keluarga dalam konsep demografi adalah seseorang yang berstatus menikah maupun tidak, baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai peran, fungsi dan tanggung jawab secara ekonomi, sosial maupun psikologis sebagai kepala keluarga. Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status perkawinan dapat digunakan untuk melihat jumlah keluarga yang dikepalai oleh seorang yang belum menikah maupun mereka yang berstatus cerai hidup maupun cerai mati. Jumlah kepala keluarga yang berstatus belum kawin, kawin, dan cerai hidup maupun cerai mati pada tahun 2019 – 2020 – 2021 mengalami peningkatan.

Data Kepala Keluarga perempuan dan laki-laki di Bantul menunjukkan peningkatan. Jumlah KK laki-laki menunjukkan peningkatan 1.138 KK sedang jumlah KK perempuan mengalami peningkatan lebih besar sebesar sebesar 2.376

KK. Kepala Keluarga perempuan sebesar 19,90% dari keseluruhan, meskipun mengalami peningkatan tetapi masih didominasi oleh laki-laki. Proporsi ini juga menunjukkan masih kentalnya budaya patriarkhi yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab penuh terhadap perekonomian rumah tangga.

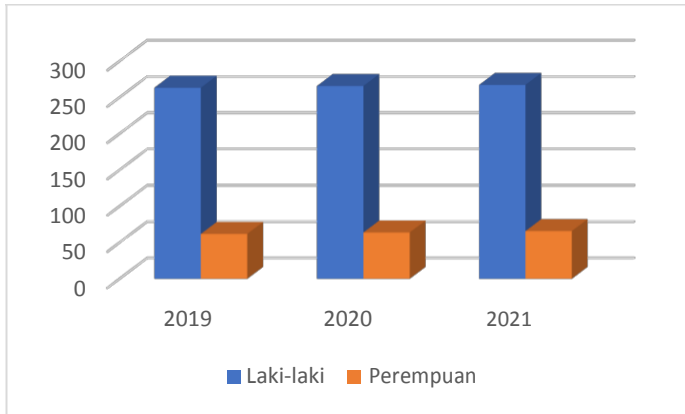
Peningkatan jumlah KK tentu saja dapat mengindikasikan tingginya jumlah pernikahan tapi juga perceraian. Isu gender yang nampak dalam data ini adalah peningkatan jumlah KK perempuan. Hal ini menunjukkan di Kabupaten Bantul masih cukup banyak terjadi fenomena janda yang berjuang mencari nafkah untuk keluarga. Perempuan yang terbiasa dalam mencari nafkah menjadi tantangan tersendiri.

Data ini dapat dilengkapi dengan data usia KK baik perempuan maupun laki-laki sehingga dapat diidentifikasi masuk kelompok usia produktif atau non produktif. Selain itu juga data tentang sumber penghidupan yang memadai dan mencukupi kebutuhan hidup perempuan dan keluarganya. Data kelompok umur dan kesejahteraan ini dapat membantu dalam menganalisa lebih lanjut kebijakan dan program yang tepat. Kriteria ini dapat membantu upaya pemberdayaan ataupun proteksi sosial yang diperlukan. Jangan sampai kelompok ini menjadi penyumbang angka kemiskinan.

Tabel 2
Jumlah Kepala Keluarga Berdasar Jenis Kelamin
Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021

Jenis Kelamin	2019	2020	2021
Laki-laki	263,253	265,711	266,849
Perempuan	61,829	63,905	66,281
Jumlah	325,082	329,616	333,130

Sumber: Disdukcapil Kab. Bantul 2021 Semester 2



Gambar 4
Jumlah Kepala Keluarga Berdasar Jenis Kelamin
Kabupaten Bantul Tahun 2019 – 2020 - 2021

Kebijakan bagi kelompok usia produktif dengan kapasitas ekonomi terbatas dapat dilakukan pemberdayaan sosial ekonomi. Tanggung jawab negara untuk pemenuhan hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan keluarga melalui JKN dan KIS maupun beasiswa pendidikan bagi anak menjadi sangat diperlukan. Namun bagi KK dengan usia non produktif atau lansia tentunya proteksi sosial menjadi utama disamping juga support lain dan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga *caregiver*.

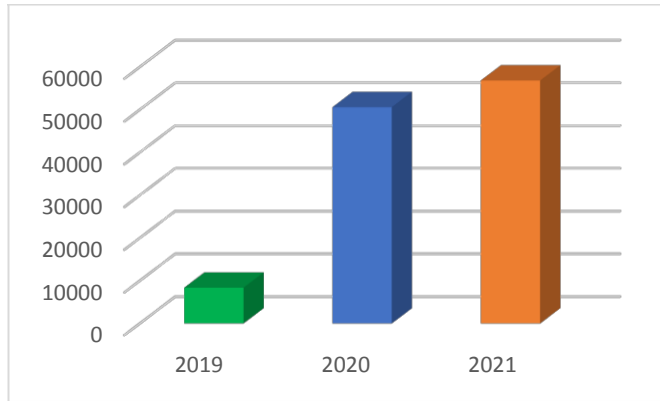
C. Rumah Tangga Miskin

Jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun 2020, yaitu bertambah 6.235 rumah tangga di tahun 2021. Hal ini dimungkinkan dipengaruhi oleh efek pandemic covid selama tahun 2020 dan 2021 yang melanda.

Tabel 3
Rumah Tangga Miskin Kabupaten Bantul
Tahun 2019 - 2020 - 2021

Jenis Kelamin	2019	2020	2021
Jumlah Rumah Tangga Miskin	8,375	50,609	56,844

Sumber: DPPKBPM Kab. Bantul



Gambar 5
Rumah Tangga Miskin Kabupaten Bantul
Tahun 2019 - 2020 - 2021

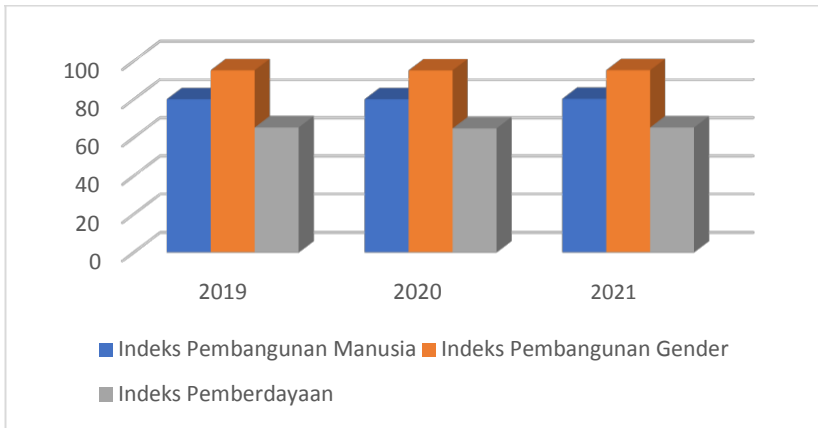
D. Indeks Pembangunan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu indikator kualitas hidup masyarakat untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Indikator ini dilihat dari 3 aspek yaitu pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah), ekonomi (pengeluaran per kapita) dan kesehatan (angka harapan hidup). Dari angka Bantul menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan keberhasilan pembangunan dalam aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pembangunan yang mensejahterakan ini apakah sudah berkeadilan baik terhadap laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dibaca dengan melihat IPG dan IDG.

Tabel 4
Indeks Pembangunan
Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021

Uraian	2019	2020	2021
Indeks Pembangunan Manusia	80.01	80.01	80.22
Indeks Pembangunan Gender	95.18	95.12	95.19
Indeks Pemberdayaan Gender	65.29	64.78	65.27

Sumber: BPS Kab. Bantul, 2021



Gambar 6
Indeks Pembangunan Kabupaten Bantul
Tahun 2019 - 2020 - 2021

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Variabel Indeks Pembangunan Gender terdiri dari angka harapan hidup, pendidikan dan pendapatan. Dari nilai IPG di Kabupaten Bantul Tahun 2021 menunjukkan angka yang cukup tinggi, yaitu 95,19. Angka ini menunjukkan pembanguan untuk kesetaraan gender di Kabupaten Bantul semakin seimbang dan merata. Pembangunan Gender mampu memperkecil gap kesejahteraan perempuan dan laki-laki. Kesenjangan Gender di Bantul dalam pembangunan semakin tereliminir.

Salah satu indikasi terciptanya kesetaraan gender adalah kontribusi yang sama dalam sektor publik antara laki-laki dan perempuan. Budaya patriarkhi yang tumbuh di Indonesia mengidentikkan sektor publik sebagai ranah laki-laki. Sementara itu, peran perempuan lebih banyak pada pekerjaan di sektor domestik/rumah tangga. Seiring berjalannya waktu, peran perempuan di sektor publik menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Perbaikan beberapa indikator ketenagakerjaan perempuan menunjukkan bahwa sektor publik bukan lagi ranah yang ditujukan untuk laki-laki (KPPPA dan BPS, 2018)¹.

Dalam mengukur capaian pemberdayaan gender di Indonesia digunakan sebuah indeks komposit yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini merupakan nama lain dari Gender Empowerment Measures (GEMs) yang dihitung

¹ Dalam Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2021

oleh UNDP. IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Meski sama-sama digunakan dalam mengukur capaian kesetaraan gender, IDG berbeda dengan IPG yang telah dibahas pada bab sebelumnya. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.

IDG Kabupaten Bantul berada di angka 65,29 di tahun 2019, 64,78 di tahun 2020 dan angka 65,27 di tahun 2021. Indeks Pemberdayaan Gender ini masih sangat jauh dari harapan. Keterwakilan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, kepemimpinan dan teknisi perempuan masih rendah. Lambatnya pertumbuhan IDG ini disebabkan oleh peran perempuan di dunia politik yang masih membutuhkan perjuangan lebih. Pemberdayaan Gender dapat tercapai ketika terjadi kontribusi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal salah satunya adalah berpolitik. Politik menjadi ruang beraktualisasi dan menyampaikan aspirasi terutama untuk kebijakan publik. Dengan terwujudnya kesetaraan gender di bidang politik diharapkan kebijakan akan lebih responsif gender.

BAB II DATA STATISTIK BIDANG KESEHATAN

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah dapat dilihat di bidang kesehatan. Umur Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Bantul pada Tahun 2021 adalah 73,89 tahun², sedikit meningkat dibandingkan tahun 2020 di angka 73,86 tahun (BPS Kabupaten Bantul, 2021). Umur harapan hidup di Kabupaten Bantul cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian capaian ini adalah angka terendah yang dicapai di seluruh DIY maka masih membutuhkan perjuangan yang lebih untuk bidang kesehatan. Rata-rata AHH DIY mencapai 74,99 tahun, Bantul masih dibawah rata-rata DIY.

Isu gender bidang kesehatan yaitu angka kematian ibu, penyebab kematian ibu, pelayanan kesehatan ibu hamil, penderita HIV AIDS, peserta KB, usia perkawinan, dispensasi nikah, perkawinan dini.

A. Jumlah Kematian Ibu

Kematian ibu atau *maternal death* menurut batasan dari *Tenth Revision of The International Classification of Disease (ICD-10)* adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Kematian ibu disebabkan oleh kejadian yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau penanganannya. Kematian ibu bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan (WHO,2010).

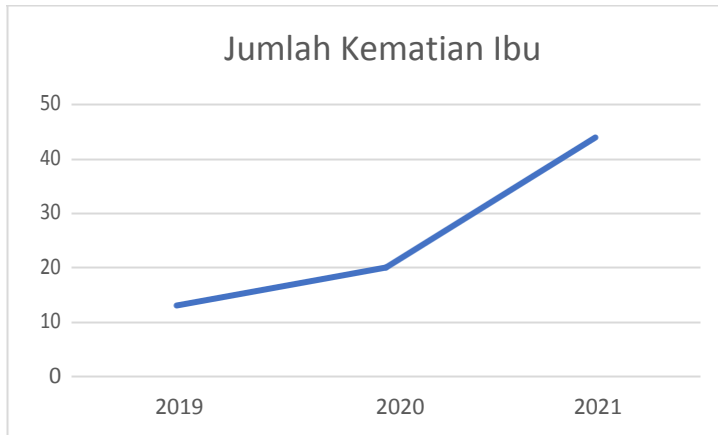
Jumlah kematian ibu pada tahun 2021 menunjukkan kenaikan jumlah dari 20 orang di tahun 2020 menjadi 44 orang. Masih relatif tingginya kematian ibu melahirkan menunjukkan masih adanya permasalahan kesehatan perempuan karena tugas reproduksinya. Tingginya kematian ibu karena sebab melahirkan tentunya banyak faktor yang menyebabkan dan akan dijelaskan pada audit data maternal. Namun selain itu perlu diketahui tantangan dan hambatan dalam penanganannya. Beberapa kasus dipicu oleh tingginya kehamilan tidak diinginkan dan persalinan usia remaja, tingginya ibu hamil dengan faktor resiko (umur, paritas, lila, anemia) atau penyakit lain, keterlambatan dalam penanganan di fasilitas rujukan, belum optimalnya peran dan pemberdayaan masyarakat dalam program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi dan faktor sosial ekonomi. Maka trend meningkatnya jumlah kematian ibu harus menjadi perhatian serius untuk segera diperoleh penanganan jitu bagi permasalahan ini.

2 (http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/512-angka-harapan-hidup?id_skpd=29).

Tabel 5
Jumlah Kematian Ibu Kabupaten Bantul
Tahun 2019 – 2020 – 2021

Tahun	2019	2020	2021
Jumlah Kematian Ibu	13	20	44

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bantul, 2021



Gambar 7
Jumlah Kematian Ibu Kabupaten Bantul
Tahun 2018 - 2020 - 2021

B. Penyebab Kematian Ibu

Hasil Audit Maternal Perinatal (AMP) menyimpulkan bahwa kematian ibu pada Tahun 2021 disebabkan oleh perdarahan, PER/PEB/eclampsia, infeksi, penyakit lain/penyerta, dan penyakit jantung. Perdarahan menjadi penyebab terbesar yaitu sebesar 35,7%. Penyakit lain lain dan penyerta penyebab terbesar kedua sebesar 28,6%, disusul penyakit jantung 21,4% dan Pre eklamsia merupakan penyebab 14,3% kematian ibu. Hasil AMP pada tahun 2021 menunjukkan perbedaan penyebab kematian ibu dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020 seperti ditunjukkan pada tabel 6.

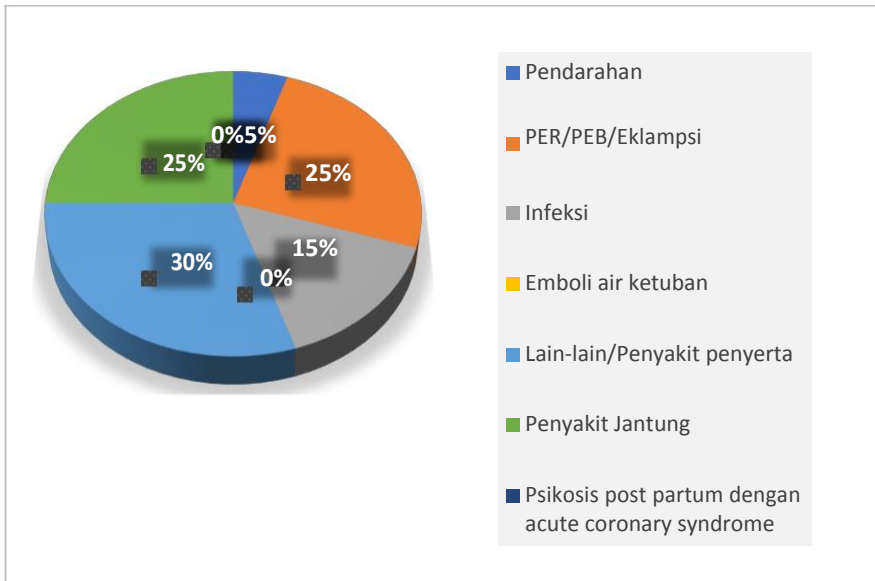
Penyebab kematian ibu melahirkan agak berbeda dengan tahun lalu dengan perdarahan menjadi pembunuh ibu terbesar. Upaya untuk menekan angka kematian ibu harus terus dilakukan. Data akan lebih bagus jika dilengkapi dengan data usia ibu yang meninggal sehingga dapat dilakukan analisis lebih lanjut. Terlebih dengan meningkatnya kejadian kehamilan berisiko, khususnya karena kehamilan di usia

anak. Audit Maternal Perinatal (AMP) yang diselenggarakan untuk mengkaji hal-hal terkait dengan riwayat dan kondisi sejak ibu masih hamil, penatalaksanaan persalinan dan kronologis kasus sampai terjadinya kematian. Hasil audit penyebab kematian ibu tersebut sebagian besar disebabkan pengenalan risiko oleh masyarakat dan petugas kesehatan serta pemilihan fasilitas layanan persalinan pada ibu hamil/bersalin/nifas dengan komplikasi yang kurang tepat sehingga menyebabkan keterlambatan penatalaksanaan kasus *emergency obstetric* di rumah sakit rujukan dengan fasilitas yang memadai.

Tabel 6
Penyebab Kematian Ibu Kabupaten Bantul
Tahun 2019 - 2020 - 2021

Penyebab Kematian Ibu	2019	2020	2021
Pendarahan	4	1	5
PER/PEB/Eklamsi	4	5	2
Infeksi	-	3	-
Emboli air ketuban	-	-	-
Lain-lain/Penyakit penyerta	2	6	4
Penyakit Jantung	2	5	3
Psikosis post partum dengan acute coronary syndrome	-	0	-
Ileus paralitik	1	0	-
Jumlah	13	20	14

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bantul



Gambar 8
Penyebab Kematian Ibu Kabupaten Bantul
 Tahun 2019 - 2020 - 2021

C. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan kesehatan ibu hamil adalah salah satu upaya yang harus dilaksanakan untuk menekan angka kematian ibu melahirkan dan kesehatan ibu dan anak. Cakupan kunjungan pemeriksaan pertama dan kunjungan pemeriksaan keempat (K1 dan K4) ideal kehamilan merupakan salah satu cara untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi yang tertuang dalam Millenium Development Goals (MDGs), dengan meningkatkan pelayanan Antenatal Care (ANC) secara teratur dan berkala yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan kebidanan/SPK. Dari data tahun 2019, 2020 dan 2021 menunjukkan pelayanan kunjungan ibu hamil di Kabupaten Bantul mencapai angka sempurna, yaitu 100% untuk K1. Sedang untuk K4 tahun 2021 nyaris sempurna mencapai angka 98,2% yang menunjukkan terjadinya peningkatan dari 86,44% pada tahun 2020.

Tabel 7
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021

Uraian	2019	2020	2021
Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4)	K1 : 15.508 (100%) K4 : 13.848 (89,30%)	K1 : 13.385 (100%) K4 : 12.088 (86,44%)	K1 = 13.661 (100%), K4 = 11.569 (98.2%)
Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil (TT1-TT5)	TT1=0,1 TT2 = 0,7 TT5 = 33	TT 1=0,0, TT 2=0,2, TT 5=49.9	TT1=0,1,TT2 =0,4,TT5= 52.9
Ibu Hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (Fe)	FE : 15.508 (100%) FE : 13.834 (89,30%)	FE : 13.385(100%) FE : 12.088 (86,44%)	11.480 (Tablet Tambah Darah)

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bantul

Anemia merupakan salah satu faktor risiko terjadinya kematian ibu melahirkan. Salah satu upaya pencegahan adalah dengan memberikan tablet Fe kepada ibu hamil sebanyak 90 tablet yang terbagi dalam tiga kali pemberian selama kehamilan. Ibu hamil yang mendapat tablet zat besi mencapai 11.480 di tahun 2021 yang menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya, terlihat masih ada ibu hamil yang tidak mendapat tablet zat besi.

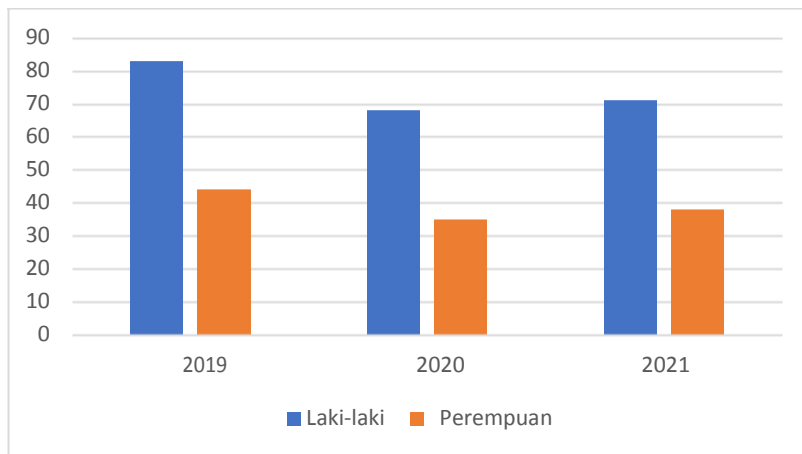
D. Penderita HIV/ AIDS

Data Dinas Kesehatan Provinsi DIY Tahun 2020 menunjukkan jumlah penderita baru HIV/AIDS di Kabupaten Bantul sebanyak 38 kasus yang merupakan angka terbesar di seluruh wilayah DIY. Jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Bantul adalah sebanyak 109 orang dengan rincian 71 orang berjenis kelamin laki-laki dan 38 orang berjenis kelamin perempuan. Data terinci pada tahun 2021 tidak berhasil ditemukan sehingga perkembangan penderita HIV/AIDS tahun 2021 tidak dapat dianalisis.

Tabel 8
Penderita HIV/ AIDS Kabupaten Bantul
Tahun 2019 – 2020 - 2021

Jenis Kelamin	2019	2020	2021
Laki-laki	83	68	71
Perempuan	44	35	38
Jumlah	127	103	109

Sumber: Dinas Kesehatan DIY



Gambar 9
Penderita HIV/ AIDS Kabupaten Bantul
Tahun 2019 - 2020 - 2021

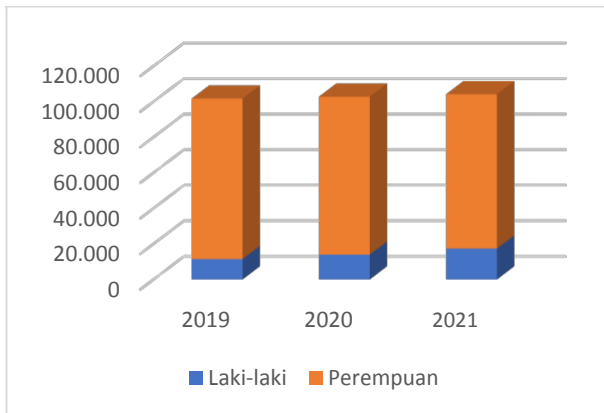
E. Peserta Keluarga Berencana

Data peserta Keluarga Berencana aktif di Kabupaten Bantul, secara keseluruhan, tahun 2020 turun daripada tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 370 orang. Penurunan ini disebabkan turunnya peserta Keluarga Berencana perempuan, yaitu sebesar 1,59%. Jumlah peserta Keluarga Berencana laki-laki mengalami kenaikan.

Tabel 9
Peserta Keluarga Berencana Kabupaten Bantul
Tahun 2019 - 2020 - 2021

Jenis Kelamin	2019	2020	2021
Laki-laki	11.472	13.962	17.362
Perempuan	90.219	88.789	86.761
Total	101.691	102.751	104.123

Sumber: DPPKBPMMD Bantul 2021



Gambar 10
Peserta Keluarga Berencana Kabupaten Bantul
Tahun 2019 - 2020 - 2021

Hal menarik yang patut dicatat adalah kenaikan jumlah peserta KB laki-laki selama 2 tahun terakhir mengalami peningkatan, sebaliknya jumlah peserta KB perempuan mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran laki laki akan pentingnya ber-KB.

Namun demikian masih diperlukan pemahaman dan kampanye secara terus-menerus untuk meningkatkan jumlah peserta KB laki-laki terutama MKJP yaitu Vasektomi. Vasektomi (Metode Operasi Pria/MOP) adalah prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan cara mengoklusi vasa deferensia sehingga alur transportasi sperma terhambat dan proses fertilisasi (penyatuan dengan ovum) tidak terjadi. Di Kabupaten Bantul capaian MOP masih sebesar 1% meski ada program reward dari Pemerintah Daerah.

F. Usia Perkawinan

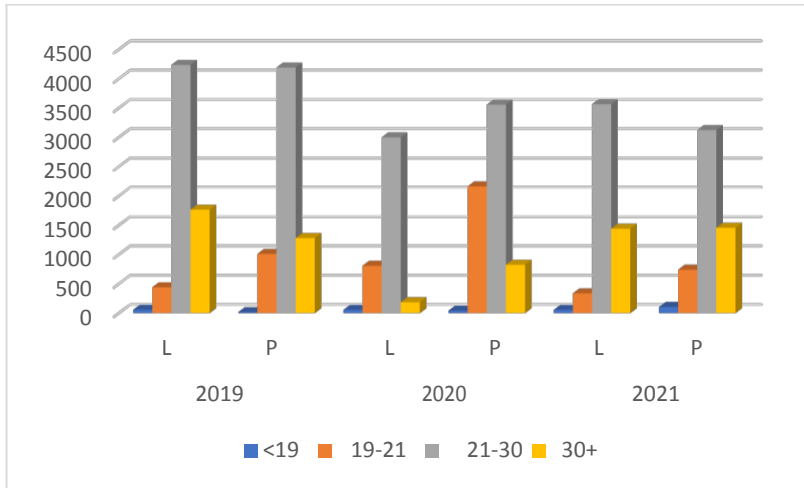
Pernikahan usia anak pada perempuan meningkatkan kerentanan anak perempuan baik untuk pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Mereka potensial tidak mendapatkan hak pendidikan yang lebih baik, kesehatan jiwa bisa terganggu (malu, depresi), gangguan kesehatan organ reproduksi karena hubungan seksual pada saat organ seksual reproduksi belum cukup matang, juga bisa berdampak pada kesehatan bayi yang dilahirkan dari seorang anak perempuan. Tingkat pendidikan yang rendah juga berdampak pada keterbatasan akses mendapat pekerjaan. Tumbuh kembang mental spiritual dan relasi sosial potensial mengalami hambatan. Sementara pada anak laki-laki, meskipun kadang pendidikan bisa terus didapatkan, namun lompatan perkembangan mental spiritual bisa jadi menimbulkan gangguan kejiwaan yang berdampak pada terganggunya relasi sosial maupun individual.

Pada tahun 2021 data usia perkawinan menunjukkan proporsi pernikahan pada usia kurang dari 19 tahun relative kecil. Mayoritas laki-laki menikah pada usia 21-30 yaitu sebanyak 66% dan mayoritas perempuan sebanyak 57%. Data ini menjadi indikasi yang baik atas kesadaran reproduksi bagi perempuan dan usia perkawinan bisa ditingkatkan.

Tabel 10
Usia Perkawinan Kabupaten Bantul
Tahun 2019 - 2020 - 2021

Usia Perkawinan	2019		2020		2021	
	L	P	L	P	L	P
<19	57	17	56	43	56	106
19-21	441	1010	808	2162	336	741
21-30	4236	4190	2999	3558	3566	3125
30+	1765	1282	186	826	1441	1457
Jumlah	6499	6499	4049	6559	5399	5429

Sumber: Kanwil Kemenag BANTUL



Gambar 11
Usia Perkawinan Kabupaten Bantul
Tahun 2019 - 2020 - 2021

G. Dispensasi Nikah

Meskipun pernikahan dini dimungkinkan menurut peraturan perundang-undangan dengan mengajukan dispensasi nikah, diperlukan strategi dan upaya pencegahan pernikahan usia anak secara preventif serta upaya Pemenuhan Hak Anak. Dalam hal ini diperlukan kerja sama lintas sektor dan antar jenjang pemerintah untuk menerapkan strategi yang efektif. Pada tahun ini data dispensasi nikah tahun 2021 tidak tersedia sehingga tidak dapat dilakukan analisis.

H. Pernikahan Dini

Mengacu pada Undang-undang No 1 tahun 1974 beserta aturan perubahannya, pernikahan dapat diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pernikahan dini adalah perkawinan dimana pihak laki-laki atau perempuan belum mencapai batas usia tersebut. Data 2 tahun sebelumnya menunjukkan bahwa kejadian pernikahan dini paling banyak terjadi pada laki-laki yang mendekati dua kali lipat daripada perempuan. Namun pada tahun 2021, sebaliknya pernikahan dini banyak pada terjadi pada perempuan.

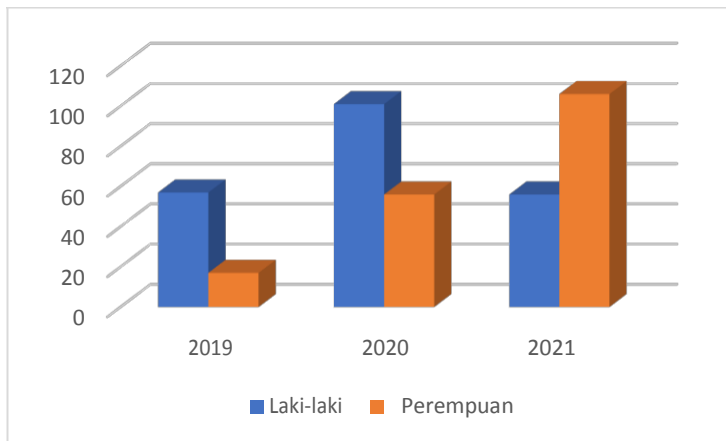
Meskipun data menunjukkan pernikahan dini dalam proporsi yang sangat kecil, yaitu kurang dari 1%, namun demikian terdapat peningkatan yang signifikan terjadinya kasus pernikahan dini pada tahun tahun 2019, 2020 dan tahun 2021. Peningkatan tersebut menunjukkan pentingnya pengembangan strategi yang efektif

dalam pencegahan pernikahan dini seperti Sosialisasi secara masif Pendewasaan Usia Perkawinan di sekolah sekolah, pada kelompok kelompok remaja, Pendidikan pada keluarga, Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja.

Tabel 11
Pernikahan Dini di Kabupaten Bantul
Tahun 2019 - 2020 - 2021

Jenis Kelamin	2019	2020	2021
Laki-laki	57	101	56
Perempuan	17	56	106
Total	74	157	162

Sumber: Kanwil Kemenag Kab. Bantul



Gambar 12
Pernikahan Dini di Kabupaten Bantul
Tahun 2019 - 2020 - 2021

BAB III

DATA DAN STATISTIK BIDANG PENDIDIKAN

Pendidikan adalah hak setiap warga negara, perempuan dan laki-laki. Pendidikan untuk semua dan seluruh warga baik di usia sekolah maupun di usia lanjut. Di satu sisi negara mempunyai kewajiban untuk membiayai pendidikan untuk warga negaranya. Hak akan pendidikan adalah hak asasi yang melekat pada anak sebagai warga negara agar dapat meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kecakapan dan keahlian sehingga ke depan mereka dapat memberikan kontribusi untuk memacu pembangunan di segala bidang.

Keberhasilan pendidikan ditunjukkan oleh antara lain indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan juga diukur dari Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM). Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah DIY pada tahun 2015 sudah diatas Indonesia. Meski begitu keberhasilan bidang pendidikan bukan tanpa catatan. Tingkat pendidikan dapat memprofilkan kapasitas dan potensi sumber daya manusia di Kabupaten Bantul.

Keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan digambarkan dalam Misi 5 K. Adapun Misi 5 K yang dimaksud adalah ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas mutu pendidikan, mewujudkan kesetaraan untuk pendidikan, dan misi yang terakhir adalah menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan, khususnya pada misi yang ke-5, yaitu kepastian mendapatkan layanan pendidikan atau pemerataan dalam layanan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, adalah melalui APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni). Pembahasan mengenai pendidikan dalam rangka melihat kualitas penduduk di Kabupaten Bantul akan dilihat menggunakan dua indikator yaitu angka partisipasi sekolah kasar dan angka partisipasi sekolah murni. Berikut beberapa isu gender bidang pendidikan.

A. Angka Melek Huruf Usia 15 – 24 Tahun

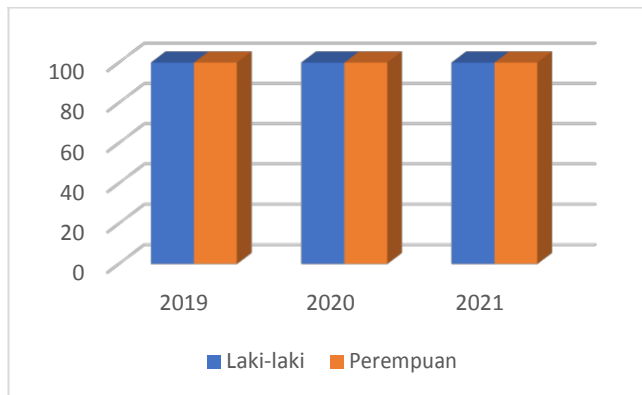
Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH merupakan indikator dasar, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator

penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Tingkat melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya.

Tabel 12
Presentase Angka Melek Huruf Usia 15 – 24 Tahun
Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021

Jenis Kelamin	2019	2020	2021
Laki-laki	100	100	100
Perempuan	100	100	100
Rata-rata	100	100	100

Sumber: DIKPORA Kab.Bantul



Gambar 13
Presentase Angka Melek Huruf Usia 15 – 24 Tahun
Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021

Data menunjukkan bahwa di Kabupaten Bantul keberhasilan program mencapai 100%. Data ini mempunyai arti bahwa semua penduduk usia 15 tahun ke atas telah mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Kemampuan ini penting untuk kebutuhan dasar anak dalam belajar dan mengetahui segala sesuatu dalam kehidupan. Dalam hal ini tidak ada disparitas

gender, perempuan dan laki-laki semua dapat membaca dan menulis. Angka ini menunjukkan adanya kesetaraan kemampuan dalam membaca dan menulis antara laki-laki dan perempuan. seperti yang telah diketahui angka melek huruf ini diperlukan sebaga indikator dasar yang dicapai suatu daerah. Membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Kemampuan ini sangat diperlukan dalam literasi baik digital maupun manual. Masyarakat yang tercerdaskan dalam membaca sangat penting di era milenal seperti sekarang ini.

B. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu.

Data angka partisipasi sekolah di tingkat kabupaten/kota memperlihatkan bagaimana partisipasi penduduk dalam bidang pendidikan. Partisipasi ini bukan hanya urusan anak dalam usia pendidikan semata, namun juga bagaimana orang tua memiliki peran sangat besar dalam pendidikan.

Berikut data pilah angka partisipasi sekolah berdasarkan jenjang pendidikan, tahun dan jenis kelamin Kabupaten Bantul.

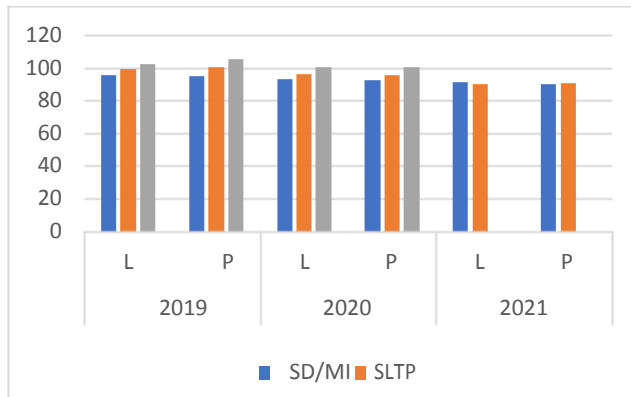
Tabel 13
Angka Partisipasi Kasar Sekolah
Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021

Jenjang Pendidikan	2019		2020		2021	
	L	P	L	P	L	P
SD/MI	95,46	94,57	92,86	92,12	90,91	90,13
SLTP	99,25	100,24	95,99	95,34	90,12	90,66
SLTA	102,26	105,05	100,06	100,59	-	-
Rata-rata	98,99	99,95	96,30	96,02	90,52	90,40

Sumber: Dikpora Kab. Bantul

Data di atas menunjukkan penurunan partisipasi anak laki-laki dan perempuan pada semua jenjang pendidikan. Nilai APK pada jenjang SLTA melebihi 100%, namun pada tahun 2021 tidak ada data karena SLTA merupakan kewenangan

Dikmen. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.



Gambar 14
Angka Partisipasi Kasar Sekolah Kabupaten Bantul
Tahun 2019 - 2020 - 2021

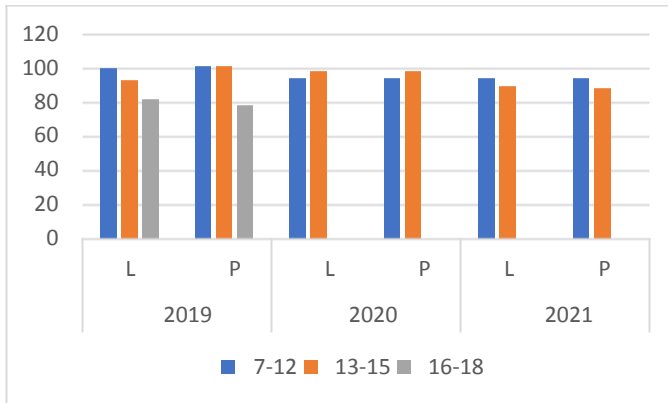
C. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan usia yang sesuai. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

Tabel 14
Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Bantul
Tahun 2019 - 2020 - 2021

Kelompok Umur	2019		2020		2021	
	L	P	L	P	L	P
7-12	100.65	101.58	94.90	94.87	94.38	94.73
13-15	93.83	101.05	98.12	98.60	89.33	88.98
16-18	82.54	78.03	-	-	-	-
Rata-rata	92.34	93.55	96.51	96.74	91.86	91.85

Sumber: DIKPORA Kab. Bantul



Gambar 15
Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Bantul
Tahun 2019 - 2020 - 2021

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa secara rata-rata penduduk perempuan memiliki akses pendidikan yang lebih baik daripada penduduk laki-laki. Nilai APS pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki pada jenjang SD dan SLTP, tetapi lebih rendah pada jenjang SLTA. Sangat disayangkan, data APS pada tahun 2019 tidak dapat diperoleh sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan.

Sejak Tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Akses pendidikan dasar ini lebih tinggi perempuan daripada laki-laki di kedua jenjang pendidikan. Dengan capaian yang tinggi ini maka masih diperlukan inovasi untuk memwadahi penduduk yang belum mempunyai akses terhadap jenjang pendidikan ini. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

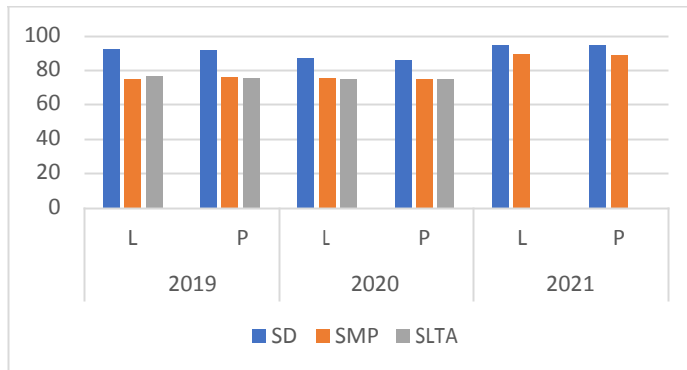
D. Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni adalah perbandingan antara penduduk dalam usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Indikator ini menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah sesuai dengan umurnya. APM juga menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya.

Tabel 15
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Bantul
Tahun 2019 - 2020 - 2021

Kelompok Umur	2019		2020		2021	
	L	P	L	P	L	P
7-12	92.32	91.76	86.87	85.71	94.38	94.73
13-15	74.87	76.05	75.28	74.89	89.33	88.98
16-18	76.77	75.12	74.96	75.06	-	-
Rata -rata	81.32	80.97	79.04	78.55	91.85	91,85

Sumber: Dikpora Kab. Bantul



Gambar 16
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Bantul
Tahun 2019 - 2020 - 2021

Data di atas menunjukkan belum semua anak bersekolah di jenjang yang sesuai dengan umurnya. Secara umum terjadi penurunan yang tidak signifikan pada nilai APS pada semua jenjang pendidikan, kecuali nilai APS laki-laki pada jenjang SLTP yang sedikit meningkat. Meskipun pemberlakuan zonasi pada sistem pendidikan memudahkan pemantuan partisipasi sekolah, namun nilai indikator tersebut perlu diinterpretasikan dengan hati-hati dengan adanya kemungkinan anak-anak yang bersekolah di luar wilayah.

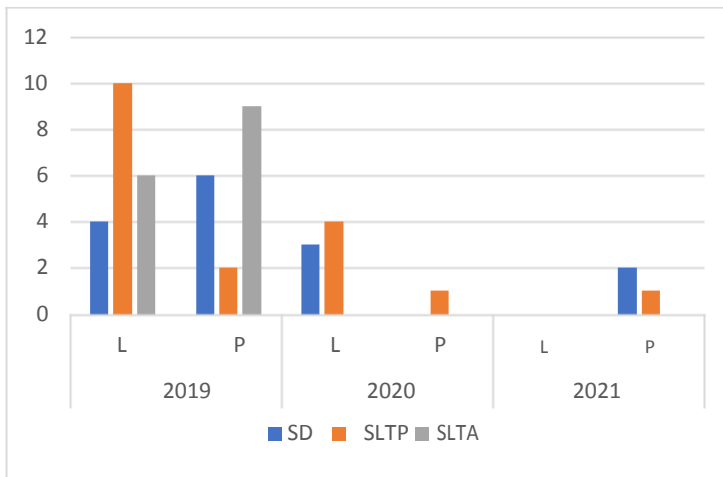
E. Angka Putus Sekolah

Meski di DIY sudah dicanangkan tidak ada anak yang tidak sekolah, namun masih ditemukan kasus putus sekolah di jenjang pendidikan dasar SD dan SMP.

Tabel 16
Angka Putus Sekolah Kabupaten Bantul
Tahun 2019 - 2020 - 2021

Jenjang Pendidikan	2019		2020		2021	
	L	P	L	P	L	P
SD	4	6	3	0	0	2
SLTP	10	2	4	1	0	1
SLTA	6	9	-	-	-	-
Jumlah	20	17	7	1	0	3

Sumber: Dikpora Kab. Bantul



Gambar 17
Angka Putus Sekolah Kabupaten Bantul
Tahun 2019 - 2020 - 2021

Data tersebut menunjukkan bahwa ada 2 siswa di tingkat SD, 1 siswa di jenjang SLTP yang mengalami putus sekolah pada tahun 2021 lebih rendah dari tahun sebelumnya. Meskipun jumlah tidak banyak namun tetap menjadi perhatian karena ini adalah pendidikan dasar.

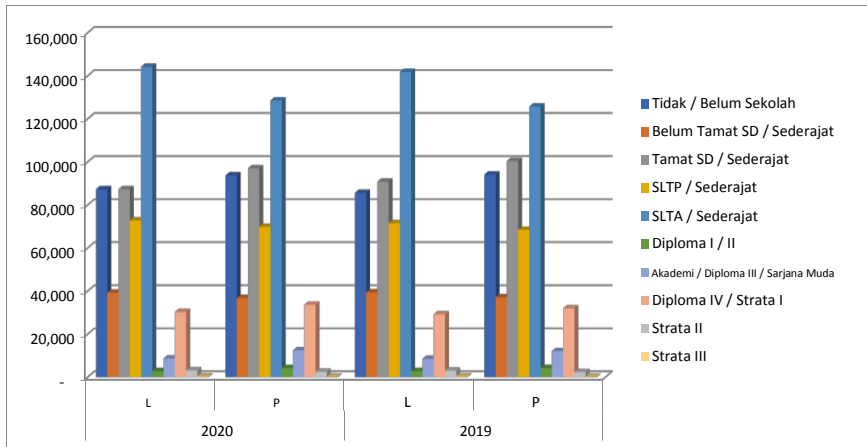
F. Penduduk Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi

Dari data yang ada, dapat dilihat masyarakat Bantul paling banyak menamatkan pendidikan SLTA setelah itu SD, SLTP dan akademi/PT. Pada jenjang SD dan akademi/PT perempuan lebih banyak menamatkan jenjang ini dibandingkan dengan laki-laki. Sebaliknya, pada jenjang SLTP dan SLTA laki-laki lebih banyak yang tamat daripada perempuan.

Tabel 17
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi
yang Ditamatkan Kabupaten Bantul
Tahun 2019 - 2020 - 2021

Pendidikan	2019		2020		2021	
	L	P	L	P	L	P
Tidak / Belum Sekolah	85,623	94,119	87,308	93,754	89,590	94,791
Belum Tamat SD/ Sederajat	39,400	37,084	39,218	36,760	38,364	35,970
Tamat SD / Sederajat	90,833	100,397	87,293	96,990	84,351	94,279
SLTP / Sederajat	71,494	68,402	72,762	69,851	72,928	70,271
SLTA / Sederajat	141,782	125,741	144,206	128,565	145,031	129,690
Diploma I / II	2,779	4,188	2,760	4,177	2,664	4,150
Akademi / Diploma III / Sarjana Muda	8,536	12,072	8,655	12,468	8,696	12,823
Diploma IV / Strata I	29,171	31,963	30,233	33,653	31,092	35,382
Strata II	3,016	2,299	3,144	2,472	3,289	2,684
Strata III	282	144	292	145	310	158
Jumlah	472,916	476,409	475,871	478,835	476,315	480,198

Sumber: Disdukcapil Kab. Bantul



Gambar 18
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi
yang Ditamatkan Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021

BAB IV

DATA DAN STATISTIK EKONOMI KETENAGAKERJAAN

Dalam buku Profil Kependudukan Bantul 2021, secara umum jika dilihat berdasarkan kelompok umurnya penduduk di Kabupaten Bantul dominan berada pada usia produktif. Sebanyak 61.9 % penduduk di Kabupaten Bantul tergolong dalam usia produktif. Usia produktif merupakan usia penduduk yang berada pada rentang usia antara 15 tahun sampai 64 tahun. Pada umur tersebut merupakan usia prima bagi seseorang sehingga dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan dalam kondisi yang terbaik. Sebesar 20.9% penduduk di Kabupaten Bantul tergolong usia muda (0-14 tahun) dan 9,65% tergolong usia tua (65 tahun ke atas). Artinya sebanyak 30.5% penduduk di Kabupaten Bantul tergolong dalam usia non produktif.

Jumlah dan proporsi tenaga kerja di Kabupaten Bantul Tahun 2021 tercatat sebanyak 595.343 orang atau 62,24 % dari jumlah penduduk. Jumlah tersebut terdiri dari 49,92 persen laki-laki dan selebihnya yaitu 50,03 persen perempuan. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2020, jumlah tenaga kerja di Kabupaten Bantul ini menunjukkan penurunan. Jumlah dan proporsi tenaga kerja di Kabupaten Bantul Tahun 2020 tercatat sebanyak 662.066 orang atau 69,34 persen dari jumlah penduduk keseluruhan. Jumlah tersebut terdiri dari 49,92 persen laki-laki dan selebihnya yaitu 50,03 persen perempuan.

Kesenjangan banyak terjadi di sektor ini, dimana perempuan mengalami marginalisasi bidang ekonomi, kesenjangan akses dan kontrol sumber daya di berbagai level. Begitu juga berbagai bentuk kesenjangan gender yang lain seperti ketimpangan upah, akses kepada pekerjaan dan pengembangan karir, hingga kepemimpinan perempuan dalam dunia bisnis dan politik.

A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

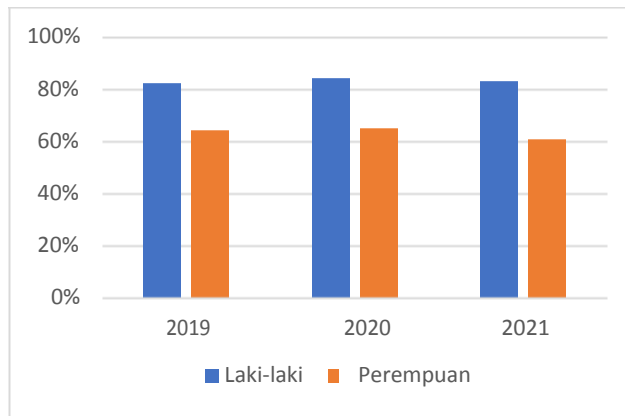
Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja yang aktif bekerja dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka ini mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah.

Tabel 18
 Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
 Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021

Jenis Kelamin	2019	2020	2021
Laki-laki	82%	84%	83.08%
Perempuan	64%	65%	60.54%
Jumlah	73%	75%	71.64%

Sumber: Disnakertrans Kab. Bantul

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja sebesar 71,64%. Berarti penduduk yang bukan angkatan kerja sebesar 28.36%. Juga dapat dilihat terjadi penurunan dalam jumlah angkatan kerja pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020.



Gambar 19
 Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
 Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktifitas perekonomian. Semakin baik kualitas tenaga kerja yang dimiliki suatu wilayah, maka produktifitas pekerjanya juga semakin meningkat. Konsep ketenagakerjaan di Indonesia merujuk pada rekomendasi ILO yang membagi penduduk berusia produktif berdasarkan aktifitasnya. Pembagian ini mencakup penduduk berdasarkan aktifitasnya ini menjadi dua yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk yang berusia kerja

yang berstatus sedang bekerja dan pengangguran. Bukan angkatan kerja mencakup mereka yang aktifitasnya bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Dari data 2 tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan tingkat pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa di Kabupaten Bantul. Dari kedua data itupun menunjukkan bahwa lebih banyak laki-laki yang masuk dalam angkatan kerja dibandingkan perempuan. Dari data tidak dapat dilihat apakah masih terdapat pekerja anak, dalam hal ini karena tidak tersedia data usia angkatan kerja. Jadi dalam hal ini masih memungkinkan adanya pekerja anak dengan data usia 15 – 18 tahun.

B. Jumlah Tenaga Kerja Migran

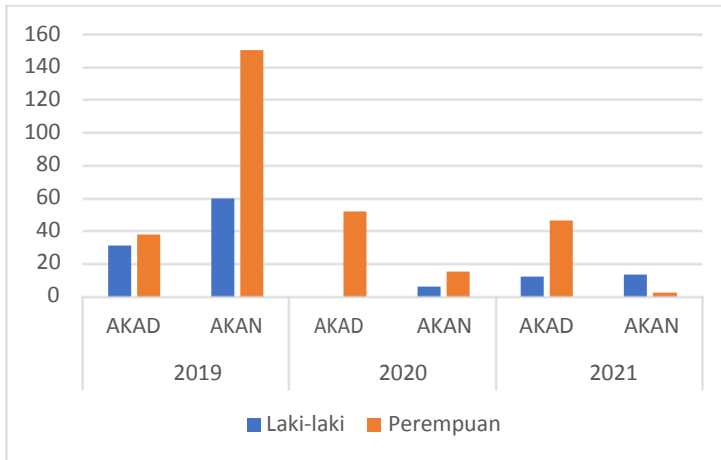
Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Pekerja migran mencakup sedikitnya dua tipe yaitu pekerja migran internal berkaitan dengan urbanisasi (antar daerah) dan pekerja migran internasional (antar negara).

- a) Antar kerja antar daerah (AKAD) adalah penempatan tenaga kerja antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia. Data didapatkan dari pekerja yang melakukan registrasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota dan Provinsi.
- b) Antar Kerja Antar Negara (AKAN) adalah penempatan tenaga kerja di luar negeri, didapatkan dari pekerja yang melakukan registrasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Tabel 19
Jumlah Tenaga Kerja Migran Kabupaten Bantul
Tahun 2019 - 2020 - 2021

Usia Perkawinan	2019		2020		2021	
	AKAD	AKAN	AKAD	AKAN	AKAD	AKAN
Laki-laki	31	60	-	6	12	13
Perempuan	38	150	52	15	46	2
Jumlah	69	210	52	21	58	14

Sumber: Disnakertrans Kab. Bantul



Gambar 20
Jumlah Tenaga Kerja Migran
Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021

Data di atas menunjukkan Kabupaten Bantul dalam dua tahun terakhir jumlah AKAN dan AKAD mengalami penurunan dari tahun ke tahun tidak hanya perempuan tetapi juga laki laki. Jumlah pekerja migran berkurang karena adanya pandemic sepanjang tahun 2020 dan 2021. Hal ini tidak terjadi untuk tahun tahun sebelumnya sebelum adanya pandemi. Sebagai pengganti Daerah menyediakan lapangan kerja dan memberikan fasilitas sesuai yang dibutuhkan oleh tenaga kerja, baik itu karir, upah dan fasilitas lainnya.

C. Pekerja Di Sektor Formal

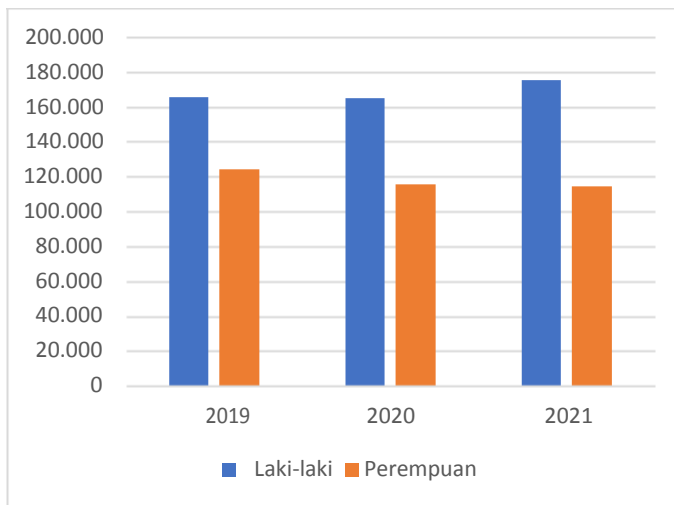
Apabila dilihat berdasarkan jenis pekerjaannya, pada tahun 2021, pekerjaan utama penduduk Bantul paling banyak adalah pekerja sektor formal yaitu sebesar 289.768 orang. Seperti biasa, pekerja formal laki laki lebih banyak dibanding perempuan. Perempuan lebih banyak terserap di sektpr informal karena bisa sekaligus mengurus rumah tangga.

Tabel 20
Pekerja Sektor Formal Kabupaten Bantul
Tahun 2019 - 2020 - 2021

Jenis Kelamin	2019	2020	2021
Laki-laki	165,728	164,990	175.406
Perempuan	124,489	115,633	114.362
Jumlah	290,217	280,623	289.768

Sumber: Disnakertrans Kab. Bantul

Di sektor formal tahun 2021, menunjukkan bahwa jumlah laki-laki yang terserap lebih banyak dibandingkan perempuan. Komposisi perempuan dan laki-laki yang berkeja di sektor formal memperlihatkan komposisi dominan pekerja laki laki, dengan 60,53% laki-laki dan 39,46% perempuan pada tahun 2021. Secara keseluruhan terjadi peningkatan jumlah pekerja formal pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu sebesar 3,1%. Penurunan yang lebih besar terjadi pada pekerja formal perempuan yaitu sebesar 1,1% sedangkan pada laki-laki terjadi kenaikan sebesar 5,93%.



Gambar 21
Pekerja Sektor Formal Kabupaten Bantul
Tahun 2019 - 2020 - 2021

Meski masih mengindikasikan bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama, dan perempuan masih menjadi warga kelas 2 di sektor ekonomi sehingga di sektor formal partisipasi laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan namun akses & partisipasi perempuan bekerja di sektor formal semakin membaik. Lebih lanjut, penting untuk melihat bagaimana akses juga prasyarat pendidikan dan kapabilitas yang dibutuhkan untuk bekerja di sektor formal berkontribusi pada ketimpangan partisipasi kerja laki-laki dan perempuan.

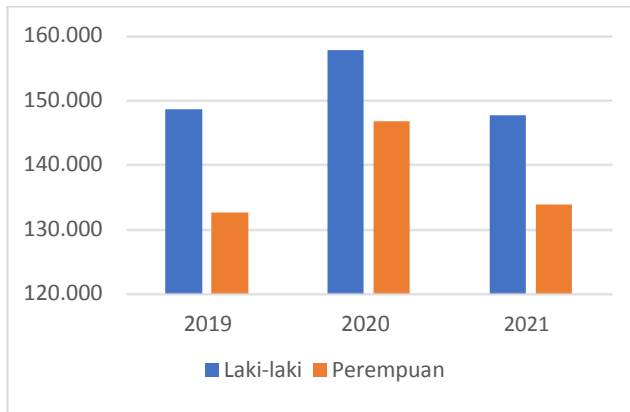
D. Pekerja Di Sektor Informal

Pekerja di sektor informal adalah orang yang status kedudukan dalam pekerjaan utama adalah berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian, dan pekerja keluarga atau tidak dibayar.

Tabel 21
Pekerja Sektor Informal Kabupaten Bantul
Tahun 2019 - 2020 - 2021

Jenis Kelamin	2019	2020	2021
Laki-laki	148,651	157,749	147,658
Perempuan	132,627	146,788	133,842
Jumlah	281,278	304,533	281,500

Sumber: Disnakertrans Kab. Bantul



Gambar 22
Pekerja Sektor Informal Kabupaten Bantul
Tahun 2019 - 2020 - 2021

Jumlah pekerja di sektor informal pada tahun 2021 menunjukkan penurunan dari tahun 2020, yaitu dari 304,573 menjadi 281,500 atau turun 7,57%. Peningkatan pekerja sektor informal perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki, yaitu sebesar 8,82% pada perempuan dan 6,4% pada laki-laki. Data kependudukan menunjukkan bahwa perempuan banyak yang belum / tidak bekerja dan mengurus rumah tangga. Untuk jenis pekerjaan mengurus rumah tangga sudah tentu tidak berbayar dan itu didominasi oleh perempuan.

E. Angka Pengangguran Terbuka

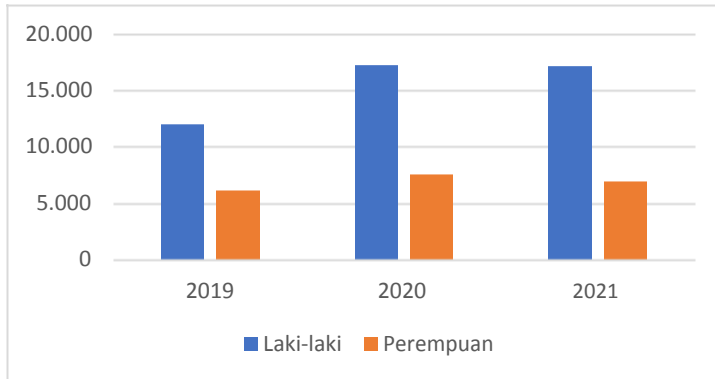
Pengangguran terbuka yaitu penduduk yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja (*jobless*). Dari data di bawah menunjukkan adanya penurunan jumlah pengangguran, dari angka 24.783 orang pada tahun 2020 menjadi 24.075 orang pada tahun 2021 atau mengalami penurunan 2,8 %. Laki-laki menyumbang angka yang jauh lebih tinggi daripada perempuan. Hal ini merupakan kewajaran karena perempuan sebagai ibu rumah tangga tidak dihitung sebagai angkatan kerja.

BPS melansir dari pengangguran terbuka ini adalah tenaga kerja yang terdidik, sayangnya data pengangguran terbuka ini belum memperlihatkan pendidikan terakhir. Data pengangguran berbasis pendidikan terakhir yang ditamatkan/dienyam akan membantu dalam membuka lapangan kerja yang bisa diakses.

Tabel 22
Angka Pengangguran Kabupaten Bantul
Tahun 2019 - 2020 - 2021

Jenis Kelamin	2019	2020	2021
Laki-laki	11.952	17.235	17.102
Perempuan	6.128	7.548	6.973
Jumlah	18.080	24.783	24.075

Sumber: Disnakertrans Kab. Bantul



Gambar 23
Angka Pengangguran Kabupaten Bantul
Tahun 2019 - 2020 - 2021

F. Keanggotaan Koperasi

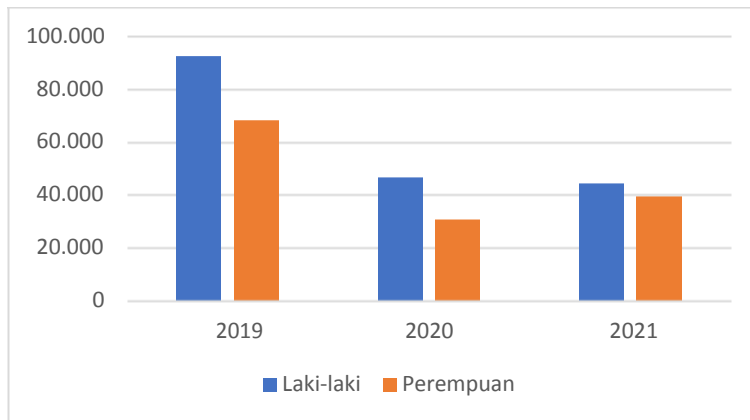
Berdasarkan data dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Bantul tahun 2021 sebanyak 364 unit, lebih banyak dari tahun 2020 sebesar 351 unit. Salah satu indikator koperasi sehat adalah kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Bahkan jika koperasi tidak menggelar RAT selama dua tahun berturut-turut, maka koperasi tersebut dipastikan akan ditutup.

Jumlah keanggotaan koperasi pada tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun 2020, yaitu naik 8%. Jumlah laki-laki lebih banyak menjadi anggota koperasi daripada perempuan.

Tabel 23
Keanggotaan Koperasi Kabupaten Bantul
Tahun 2019 - 2020 - 2021

Jenis Kelamin	2019	2020	2021
Laki-laki	92.207	46.406	44.329
Perempuan	68.041	30.580	39.358
Jumlah	160.248	76.986	83.687

Sumber: DISKUKMP Kab. Bantul



Gambar 24
Keanggotaan Koperasi Kabupaten Bantul
Tahun 2019 - 2020 - 2021

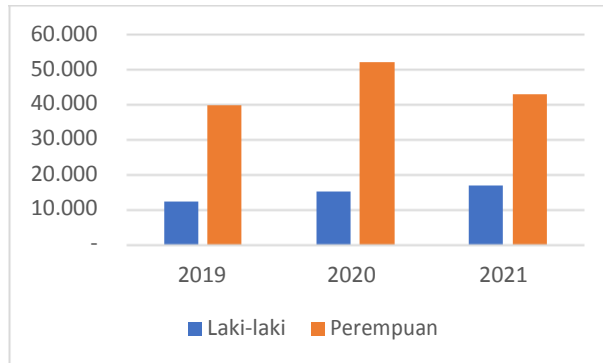
G. Pekerja Tak Dibayar (*unpaid worker*)

Data pekerja tak dibayar (*unpaid worker*) di Kabupaten Bantul pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 24
Pekerja Tak Dibayar (*unpaid worker*)
Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021

Jenis Kelamin	2019	2020	2021
Laki-laki	12,200	15,206	16,910
Perempuan	39,735	52,113	42,876
Jumlah	51,935	67,319	59,786

Sumber: BPS Kab. Bantul



Gambar 25
Pekerja Tak Dibayar (*unpaid worker*)
Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021

Pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha tetapi tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang atau barang. Jumlah pekerja tidak dibayar pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 11,19% dari tahun 2020. Seperti tahun tahun sebelumnya jumlah pekerja perempuan jauh lebih banyak dibandingkan laki laki. Kondisi seperti ini dapat dilihat bahwa masih terjadinya kesenjangan gender dimana terjadi diskriminasi terhadap perempuan.

BAB V DATA DAN STATISTIK BIDANG POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pengarusutamaan gender di bidang politik melihat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai level tingkatan dan lembaga publik. Quota 30% perempuan yang menduduki jabatan publik baik di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif secara umum masih belum terpenuhi. Meski begitu beberapa posisi memperlihatkan adanya kenaikan partisipasi perempuan dalam struktur pengambil keputusan, terutama di ranah eksekutif.

Isu keterlibatan perempuan dalam kelembagaan politik menjadi salah satu catatan penting yang menggambarkan keberhasilan ataupun kegagalan strategi pengarusutamaan gender. Dalam hal ini, keterlibatan dalam kelembagaan seperti lembaga daerah adalah capaian penting yang bisa menjadi salah satu penanda dan prasyarat untuk mendorong pemenuhan hak dasar perempuan yang lebih baik. Indikator ini menggambarkan kondisi peran gender pada jabatan di pemerintahan, seberapa banyak perempuan yang berada dalam jabatan di pemerintah yaitu sebagai Pejabat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Panewu dan Lurah.

- a) Jumlah Bupati/walikota, yaitu jumlah Kepala Daerah yang memimpin kabupaten/kota berdasarkan jenis kelamin. Karena bupati/walikota merupakan jabatan politis, dari sini bisa dilihat aksesibilitas perempuan sebagai kontestan dalam pilkada dan mekanisme politik yang ada.
- b) Jumlah Panewu, yaitu jumlah pemimpin Kapanewon sebagai perangkat daerah Kabupaten yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kapanewon di Bantul yang dipilah berdasarkan jenis kelamin.
- c) Jumlah Lurah, indikator ini menggambarkan proporsi antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah kepemimpinan di level kalurahan. Meskipun belum seimbang secara proporsi, tetapi perempuan sudah memiliki kesempatan dan aksesibilitas yang sama dengan laki-laki untuk memimpin desa/kelurahan.
- d) Jumlah pejabat PNS berdasarkan eselon, indikator ini menggambarkan perbandingan jabatan pada eselon I s/d IV di dalam pemerintah antara laki-laki dan perempuan.
- e) PNS menurut jenis kelamin dan golongan, menunjukkan jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang dipilah berdasarkan jenis kelamin dan golongan. Data banyaknya pegawai negeri sipil menurut jenis kelamin, dapat digunakan untuk melihat proporsi PNS perempuan terhadap laki-laki. Besarnya proporsi PNS perempuan pada sektor ketenagakerjaan menunjukkan bahwa laki-laki

dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pegawai negeri khususnya dan lapangan kerja secara umum.

- f) Tim Badan Pertimbangan dan Kepangkatan adalah komposisi Tim Badan Pertimbangan dan Kepangkatan di Kabupaten.

Di luar itu, kepemimpinan dalam organisasi sosial politik juga menjadi bagian dalam mendorong lebih banyak keputusan yang berpihak kepada perempuan. Terkait dengan partisipasi perempuan dalam kebijakan publik berikut adalah isu yang ditemukan.

A. Partisipasi Lembaga Legislatif

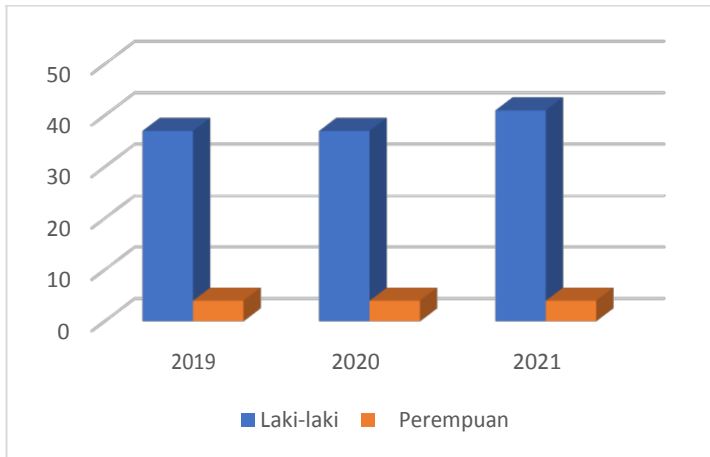
Indikator ini merupakan salah satu indikator untuk penghitungan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) yaitu indikator yang memfokuskan pada perempuan yang menduduki parlemen sebagai anggota legislatif, perempuan yang menduduki jabatan manajer dan tenaga profesional.

Tabel 25
Partisipasi di Lembaga Legislatif
Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021

Jenis Kelamin	2019	2020	2021
Laki-laki	37	37	41
Perempuan	4	4	4
Jumlah	41	41	45

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul

Data perempuan di legislatif selalu memberi catatan merah, karena sedikitnya perempuan yang mampu duduk di lembaga yang satu ini. Banyak faktor yang mempengaruhi jumlah perempuan di legislatif. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan jumlah perempuan di legislatif. Upaya afirmasi dari regulasi sampai kebijakan tetap saja tidak mampu mengontrol jumlah perempuan di parlemen. Faktor keterpilihan memang masih menjadi tantangan tersendiri bagi politisi perempuan karena secara regulasi tidak ada afirmasi bagi keterpilihan perempuan di parlemen.



Gambar 26
Partisipasi di Lembaga Legislatif
Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021

Rendahnya kualitas partisipasi dan kontrol perempuan di parlemen. Quota perempuan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih jauh dari 30%, hanya 8,8%, masih jauh dari ideal. Bila dilihat dari pencalonan, partisipasi perempuan dapat mencapai quota minimal 30%. Kondisi ini didukung oleh peraturan dan kebijakan yang mengafirmasi perempuan. Namun sayangnya tidak dalam tahapan elektoral, perempuan dan laki-laki harus sama-sama berjuang untuk meraih suara, tidak ada afirmasi bagi perempuan. Hasilnya banyaknya perempuan calon legislatif belum mampu membuat perempuan menduduki jabatan sebagai wakil rakyat. Lemahnya dukungan parpol terhadap perempuan, menjadikan perempuan yang tertinggal startnya dalam bidang politik juga lemahnya kontrol sumberdaya membuat perempuan semakin tertatih di ranah politik. Sedikitnya perempuan yang duduk di parlemen menjadikan semakin rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Selain itu rendahnya representasi perempuan di dewan juga menyebabkan menurunnya kontrol perempuan dalam pengambilan kebijakan dewan.

B. Partisipasi di Lembaga Penegak Hukum

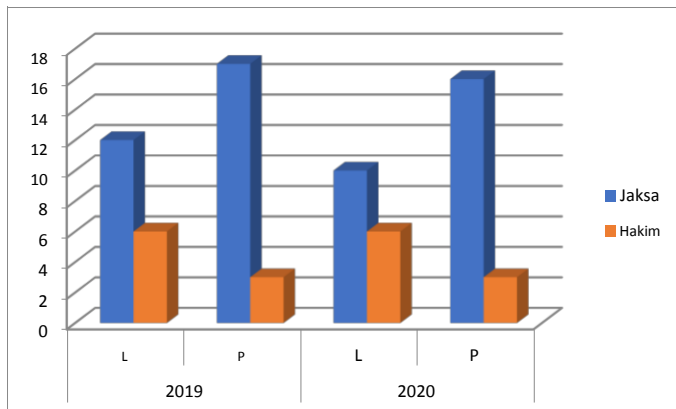
Lembaga yudikatif merupakan lembaga yang berkuasa dalam penegakan hukum. Pasal 24 (2) UUD 1945 hasil perubahan ketiga, menyebutkan "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan

oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Partisipasi perempuan di lembaga yudikatif sangat diperlukan untuk mewarnai dan memberikan keadilan gender di lembaga ini.

Tabel 26
Partisipasi di Lembaga Penegak Hukum
Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021

Lembaga	2019		2020		2021	
	L	P	L	P	L	P
Jaksa	12	17	10	16	12	19
Hakim	6	3	6	3	6	3
Polisi	1378	124	1352	126	1359	157

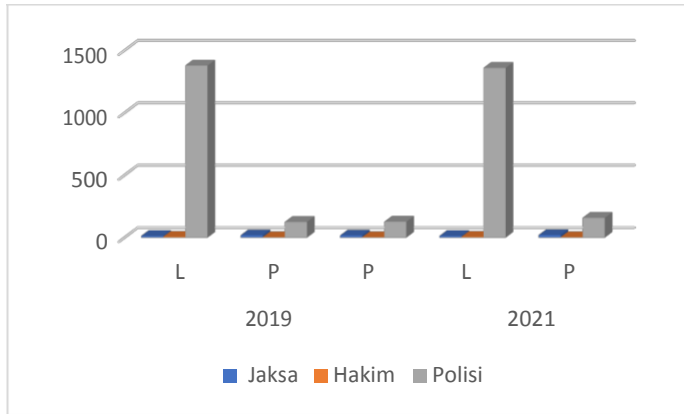
Sumber: Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Polres



Gambar 27.a

Partisipasi di Lembaga Penegak Hukum: Jaksa dan Hakim
Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021

Perempuan yang menjabat sebagai jaksa di jajaran pengadilan di Kabupaten Bantul tahun 2010, secara persentase menduduki 36%, lebih tinggi dibanding jumlah jaksa laki-laki. Proporsi ini meningkat dibanding tahun 2020. Dengan demikian, posisi perempuan sebagai jaksa di Bantul menguat di tahun 2021. Sementara itu posisi hakim di Pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2021 tidak mengalami perubahan dari tahun 2020.



Gambar 27.b
Partisipasi di Lembaga Penegak Hukum: Kepolisian
Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021

Untuk Instansi Kepolisian di Kabupaten Bantul, jumlah polisi pada tahun 2020 dan 2021 masih didominasi oleh laki-laki, namun pada tahun 2021 perempuan yang mengalami kenaikan. Proporsi polisi wanita di Kabupaten Bantul pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 19,75 %.

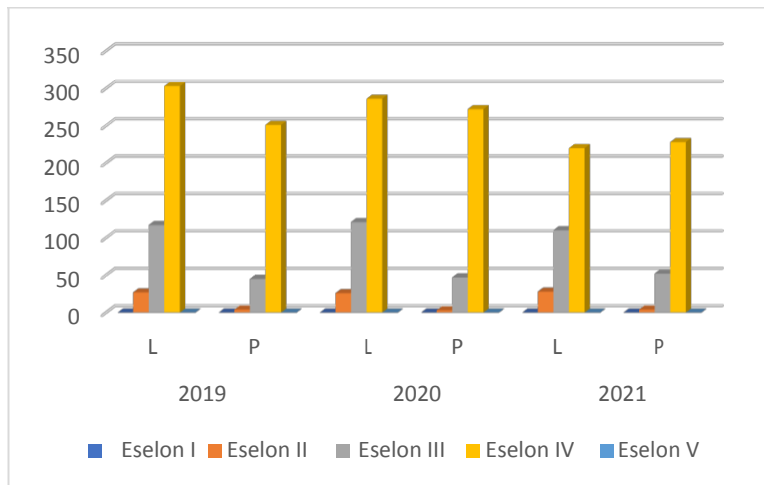
C. Pejabat Struktural

Data pejabat Struktural berdasarkan jenis jabatan dan jenis kelamin secara umum menunjukkan adanya penurunan jumlah pejabat struktural. Dari data juga menunjukkan bahwa para pejabat di Bantul didominasi oleh laki-laki pada tingkatan eselon II hingga eselon IV, tidak ada pengisi jabatan struktural pada eselon I dan V. Perempuan paling sedikit persentasenya pada eselon I dan semakin meningkat sesuai dengan kenaikan eselon, hingga mendekati berimbang pada eselon IV. Partisipasi perempuan sebagai pejabat struktural pada tahun 2020 dan 2021 masih relatif kecil. Pada tahun 2021, partisipasi perempuan di Eselon II sebesar 17,75%, Eselon III sebesar 32,10% dan Eselon IV lebih banyak perempuan sebesar 50,89%. Posisi tersebut mengalami kenaikan yang tidak signifikan dibanding tahun 2019, kecuali Eselon II yang menurun tidak signifikan. Hal tersebut secara sekilas menunjukkan bahwa pejabat perempuan mengalami peningkatan karir yang lebih baik dibanding laki-laki.

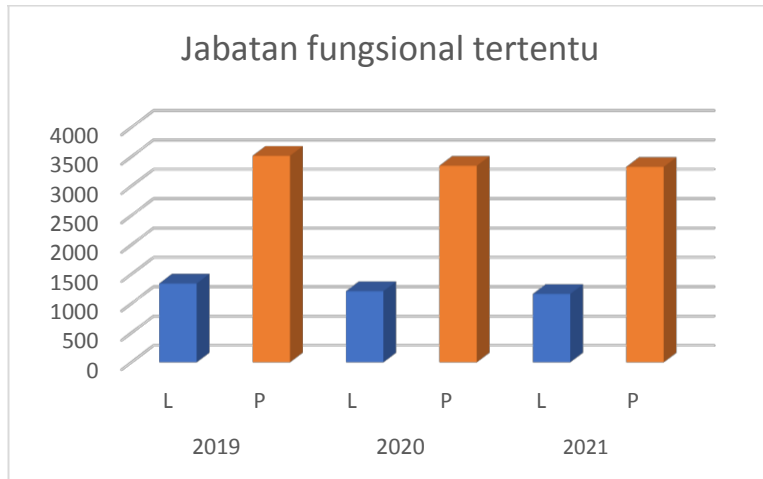
Tabel 27
Pejabat Struktural Berdasarkan Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin
Tahun 2019 - 2020 - 2021

Kategori Struktural	2019		2020		2021	
	L	P	L	P	L	P
Eselon I	-	-	-	-	-	-
Eselon II	27	4	26	3	28	4
Eselon III	117	45	121	47	110	52
Eselon IV	303	251	286	272	220	228
Eselon V	-	-	-	-	-	-
Jabatan fungsional tertentu	1343	3517	1212	3347	1164	3329

Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, 2021



Gambar 28.a
Partisipasi Perempuan sebagai Pejabat Struktural
Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021



Gambar 28.b

Partisipasi Perempuan sebagai Pejabat Fungsional Tertentu
Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021

Partisipasi perempuan pada jabatan fungsional tertentu menunjukkan angka yang lebih baik, dimana jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki bahkan dapat dikatakan dominan, mencapai 74,09% di tahun 2021. Proporsi ini menunjukkan kenaikan yang tidak signifikan dari tahun 2020 yang lebih disebabkan penurunan jumlah pejabat fungsional laki-laki.

D. Pengurus Harian Parpol

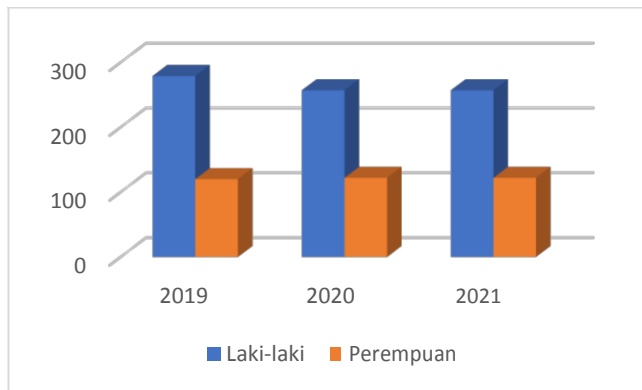
Salah satu faktor penting dalam proses politik untuk mendukung berbagai kebijakan politik sangat penting bagi perempuan untuk menduduki jabatan strategis dan politis di dalam partai politik. Pengkaderan politik dapat berlangsung dan punya perspektif perempuan. Proses politik dalam menentukan jabatan publik pun sering kali memerlukan dukungan politik sehingga posisi perempuan dalam kepemimpinan partai politik menjadi posisi strategis.

Data menunjukkan bahwa proporsi perempuan dalam pengurus harian partai sudah mencapai kuota minimum, yaitu 30%. Data pada tahun 2020 tidak dapat diperoleh. Masa jabatan kepemimpinan partai politik bersifat periodik dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, maka perubahan proporsi kepemimpinan partai politik belum tentu bisa terlihat setiap tahun.

Tabel 28
Pengurus Harian Parpol Kabupaten Bantul
Tahun 2019 - 2020 – 2021

Jenis Kelamin	2019	2020	2021
Laki-laki	279	257	257
Perempuan	120	122	122
Jumlah	399	379	379

Sumber: Kesbangpolinmas



Gambar 29
Pengurus Harian Parpol Kabupaten Bantul
Tahun 2019 - 2020 - 2021

Pada tahun inipun kuota 30% dalam kepengurusan partai politik tercapai. Partisipasi minimum perempuan di Bantul minimum terpenuhi namun kerja-kerja politik menjadi sangat penting. Partisipasi perempuan dalam partai politik tidak hanya kuantitatif namun juga harus kualitatif, sehingga mampu menyumbangkan pemikiran yang substantif bagi perjuangan kesetaraan khususnya di Kabupaten Bantul.

Perlu adanya perhatian serius atas pencapaian ini mengisi dan membuat kualitas yang baik bagi perempuan politisi. Pelatihan kepemimpinan, pembuatan kebijakan publik dan peningkatan kapasitas mereka di bidang politik sangat diperlukan. Mendidik perempuan untuk berjuang dan mampu menggunakan politik dengan benar. Mengambil jalan politik secara bermartabat dan elegan.

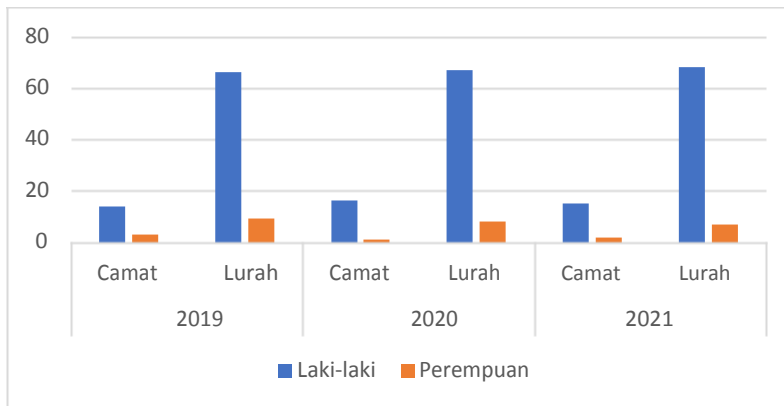
E. Pejabat Panewu Dan Lurah di Kabupaten Bantul

Partisipasi perempuan sebagai pemimpin di tataran lokal baik di Kalurahan maupun Kapanewon sebagai Kepala wilayah sangat penting. Kedua jabatan ini sangat strategis dalam pembangunan berkeadilan. Lurah sebagai jabatan politik dimana jabatan ini di pilih dalam proses pemilihan langsung. Sedangkan Panewu adalah jabatan administratif dengan pengangkatan dan penunjukan oleh negara. Kedua jabatan ini menjadi penting karena langsung bersentuhan dengan *grassroot* akar rumput.

Tabel 29
Pejabat Panewu Dan Lurah di Kabupaten Bantul
Tahun 2019 - 2020 - 2021

Jenis Kelamin	2019		2020		2021	
	Camat	Lurah	Camat	Lurah	Panewu	Lurah
Laki-laki	14	66	16	67	15	68
Perempuan	3	9	1	8	2	7
Jumlah	17	75	17	75	17	75

Sumber: PMKa



Gambar 30
Pejabat Panewu Dan Lurah Kabupaten Bantul
Tahun 2019 - 2020 - 2021

Di ranah eksekutif beberapa posisi memperlihatkan adanya penurunan partisipasi perempuan dalam struktur pengambil keputusan, dalam hal ini Panewu sebagai jabatan administrative masih sebesar 11,7%. Dalam konteks ini penunjukan

dan penetapan Panewu sebagai kepala wilayah administratif mestinya dapat mempertimbangkan aspek 30% keterwakilan perempuan. Memberi kesempatan kepada lebih banyak perempuan untuk menjadi pemimpin administratif sebagai . Sedangkan untuk jabatan Lurah juga belum menunjukkan adanya perbaikan dari tahun sebelumnya sebesar 9,3%.

F. Tim Penilai Kerja

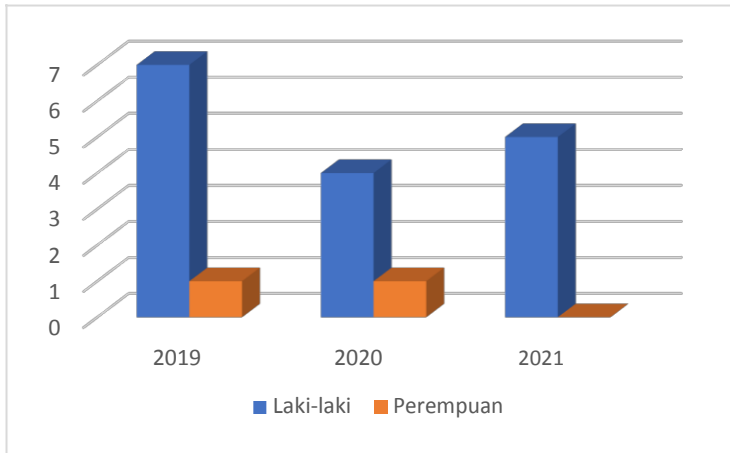
Partisipasi perempuan dalam tim ini sangat penting dan harus diperhatikan. Harapan dari adanya perempuan disini adalah ada inisiasi penilaian OPD yang responsif gender, apakah penilaian mengacu pada dokumen semata atau juga menilai kesesuaian *outcome* dan dampak kebijakan/progam OPD dengan membaiknya relasi gender (koreksi positif terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan pada sasaran, atau berkurangnya kesenjangan antara laki-laki dengan perempuan, atau membaiknya APKM kelompok rentan atas pembangunan.

Tabel 30
Tim Penilai Kerja Kabupaten Bantul
Tahun 2019 - 2020 – 2021

Jenis Kelamin	2019	2020	2021
Laki-laki	7	4	5
Perempuan	1	1	0
Jumlah	8	5	5

Sumber: BKPP Kab. Bantul

Ada perubahan dari tim penilai kerja ini. Namun pada tahun 2020 ada 1 perempuan masuk dalam tim ini, atau sekitar 12.50%. Sedangkan tahun 2021 tidak ada. Pada tahun 2021 jumlah anggota laki-laki bertambah 1 orang menjadi 5 orang,. Tim ini bertanggung jawab memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam pengangkatan, mutasi, pemberhentian para aparatur negara. Rendahnya persentase perempuan dalam Tim Penilai Kinerja ini bisa jadi berpengaruh pada dukungan pada perempuan untuk menduduki jabatan pengambilan kebijakan. Hal ini masih bisa dipertanyakan berkaitan dengan pandangan perempuan dan laki-laki dalam mendorong kepemimpinan perempuan.



Gambar 31
Tim Penilai Kerja Kabupaten Bantul
Tahun 2019 - 2020 - 2021

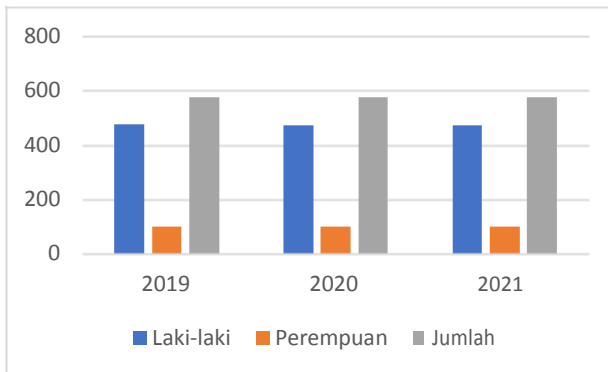
G. Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Partisipasi perempuan dalam politik di level desa selain menjadi kepala desa adalah dengan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa. Badan ini adalah lembaga legislatif di level desa, dimana salah satu tugasnya adalah membuat peraturan desa. Sehingga dengan duduknya perempuan di lembaga desa ini akan mendorong kebijakan di level desa menjadi responsif gender. Lembaga ini adalah lembaga publik terdekat dengan masyarakat sehingga aspirasi dan permasalahan rakyat dapat terakomodir termasuk perempuan. Lembaga ini menjadi sangat strategis untuk mengalamatkan dan memastikan pembangunan responsif gender.

Tabel 31
Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 – 2021

Jenis Kelamin	2019	2020	2021
Laki-laki	474	473	473
Perempuan	101	102	102
Jumlah	575	575	575

Sumber: Kesbangpolinmas



Gambar 32
 Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
 Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021

Partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif yang ada di level kalurahan ini pada tahun 2021 masih menunjukkan angka yang relatif kecil, dengan persentase 17,6%. Proporsi ini tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun 2020. Persentase yang masih cukup kecil untuk merepresentasikan jumlah perempuan yang ada di lingkup desa. Desa merupakan representasi kecil dari negara, bagaimana perempuan mempunyai akses pada lembaga ini dimana representasi ini diharapkan mampu menjadi representasi tidak hanya dalam nilainya sebagai kuantitatif saja namun juga sebagai representasi yang kualitatif. Dengan adanya cukup perempuan yaitu minimal 30% dalam jabatan ini diharapkan mampu mengisi dan memperjuangkan kepentingan perempuan dan biasanya di dalamnya menempel kepentingan anak dan lansia juga disabel dalam pembangunan yang ada di level desa dan selanjutnya di level berikutnya. Rendahnya partisipasi perempuan dalam lembaga pembuat kebijakan di level desa ini memberikan kontribusi pada pembangunan desa yang bias gender.

BAB VI DATA DAN STATISTIK BIDANG HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA

A. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Jumlah penghuni Lapas tidak mengalami perubahan yang signifikan, dimana penghuni lapas kesemuanya adalah laki-laki. Data ini diperoleh dari data lapas kelas B di Bantul. Data ini setelah diverifikasi ternyata karena penghuni perempuan ditempatkan pada lapas perempuan yang ada di Kota Yogyakarta.

Tabel 32
Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 – 2021

Jenis Kelamin	2019	2020	2021
Laki-laki	155	140	144
Perempuan	-	-	-
Jumlah	155	140	144

Sumber: Laporan UPT Rutan kelas II Bantul, 2021



Gambar 33
Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 – 2021

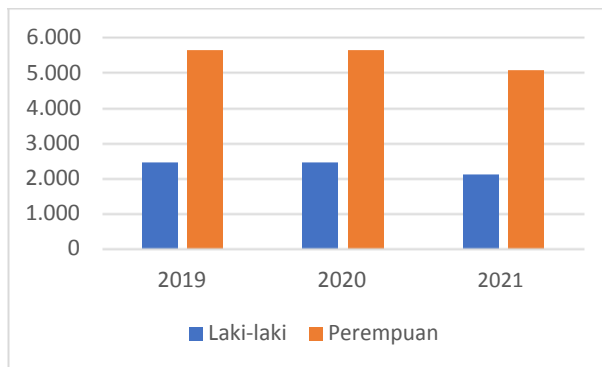
B. Penduduk Lanjut Usia (Lansia) Terlantar

Penduduk lansia usia 60 tahun ke atas yang terlantar di Kabupaten Bantul tidak menunjukkan adanya perubahan dari tahun sebelumnya.

Tabel 33
Penduduk Lanjut Usia (Lansia) Terlantar Kabupaten Bantul
Tahun 2019 - 2020 – 2021

Jenis Kelamin	2019	2020	2021
Laki-laki	2,456	2,456	2,120
Perempuan	5,629	5,629	5,088
Jumlah	8,085	8,085	7,208

Sumber: Data SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri Semester 2 tahun 2021



Gambar 34
Penduduk Lanjut Usia (Lansia) Terlantar Kabupaten Bantul
Tahun 2019 - 2020 - 2021

Data Dinas Sosial memperlihatkan bahwa kebanyakan lansia terlantar adalah perempuan. Di tahun 2020 apabila diperhatikan persentase perempuan adalah sebesar 70,59%. Jumlah ini sangat besar dan harus menjadi perhatian yang cukup untuk penanganannya. Penanganan terhadap perempuan lansia terlantar perlu menjadi perhatian bagi pembuatan kebijakan ke depan.

C. Penyandang Disabilitas

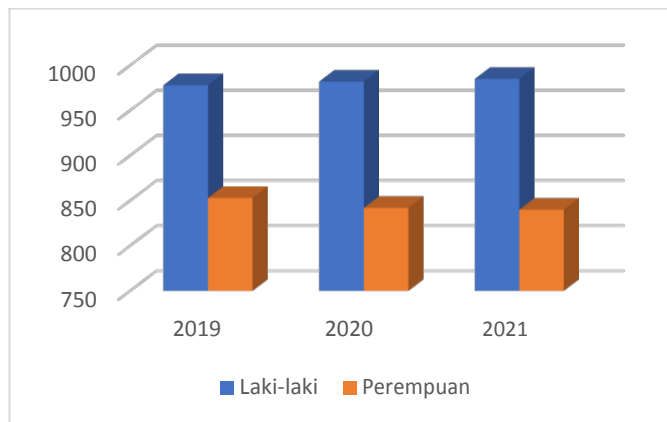
Menurut Undang-Undang nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas (Penda) yaitu orang yang

memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Tabel 34
Penyandang Disabilitas Kabupaten Bantul
Tahun 2019 - 2020 – 2021

Jenis Kelamin	2019	2020	2021
Laki-laki	978	982	985
Perempuan	853	842	840
Jumlah	1831	1824	1825

Sumber: Dinas P3A Kab. Bantul



Gambar 35
Penyandang Disabilitas Kabupaten Bantul
Tahun 2019 - 2020 - 2021

Dalam Buku Profil Kependudukan Kabupaten Bantul 2021, jumlah penduduk menurut kecacatan penting diketahui untuk memperkirakan jumlah kesempatan kerja dan penyediaan fasilitas umum bagi penyandang cacat. Pada tahun 2021 di Kabupaten Bantul terdapat penyandang cacat, yang terdiri dari 53,97 persen laki-laki dan 46,03 persen perempuan. Dari data ini diketahui bahwa laki-laki lebih banyak menyandang disabilitas maka diperlukan program afirmasi bagi laki-laki terkait jenis disabilitasnya.

Jumlah penyandang disabilitas membutuhkan verifikasi. Diperlukan program khusus untuk memenuhi hak-hak dasarnya. Data terpilah sesuai dengan umur dan jenis kedifabelannya diperlukan untuk mengetahui kebutuhan apa yang diperlukan untuk hidup dan juga untuk hak yang lain dan tentu saja yang menjadi kewajiban pemerintah.

BAB VII

DATA DAN STATISTIK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Kekerasan merupakan persoalan pelanggaran hak, termasuk juga didalamnya adalah kekerasan berbasis gender. Yang khas dari kekerasan berbasis gender adalah argumen dan nalar dibalik tindakan kekerasan ini, yang menggambarkan bekerjanya kerangka relasi kuasa berbasis gender. Kekerasan berbasis gender, kerap kali dipakai sebagai pembenaran atas tindakan-tindakan pendisiplinan. Namun sebetulnya sangat berpotensi menyembunyikan persoalan sesungguhnya yaitu tentang ketidaksetaraan dan ketidakadilan relasi. Dalam tata nilai yang patriarkhis, kekerasan berbasis gender telah menjadikan perempuan dan anak-anak menjadi korban dan paling terparah dari berbagai bentuk kekerasan.

Keprihatinan bersama atas data yang menunjukkan adanya tren peningkatan kasus kekerasan terjadi dari tahun ketahun. Korban maupun pelaku kekerasan semakin muda dengan jenis kekerasan yang beragam. Berikut adalah data kekerasan di Kabupaten Bantul.

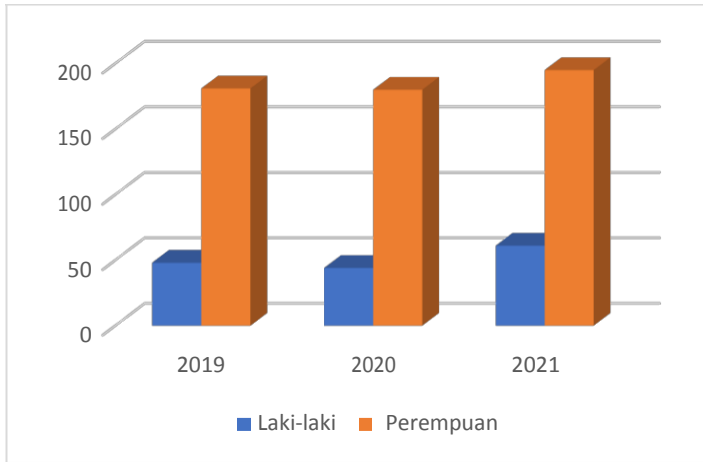
A. Jumlah Kekerasan Menurut Jenis Kelamin

Dari data di bawah ini menunjukkan terjadinya peningkatan kasus kekerasan di Kabupaten Bantul, yaitu turun sebesar 12,5% , angka yang cukup signifikan. Jumlah yang besar kasus kekerasan sekitar 76,17% dialami oleh perempuan. Dilihat dari data ini perempuan masih menjadi obyek kekerasan. Posisi perempuan masih lemah, dan ironisnya itu terjadi dalam rumah tangga.

Tabel 35
Jumlah Kekerasan Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 – 2021

Jenis Kelamin	2019	2020	2021
Laki-laki	48	44	61
Perempuan	181	180	195
Jumlah	229	224	256

Sumber: UPTD PPA Kab. Bantul



Gambar 36
Jumlah Kekerasan Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021

B. Jumlah Korban Kekerasan Menurut Umur

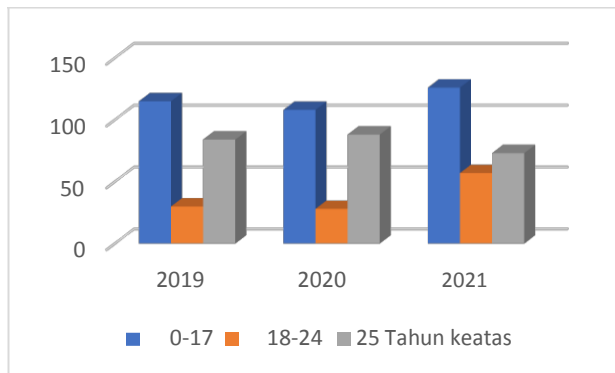
Lebih detail jumlah korban kekerasan juga mengalami peningkatan , kecuali pada umur 25 tahun keatas yang penurunan. Kenaikan terbesar pada usia remaja. Banyaknya jumlah ini dapat dinilai sebagai meningkatnya kesadaran masyarakat akan adanya kekerasan yang menimpa dirinya atau yang terjadi di lingkungannya dan kemudian mempunyai keberanian untuk melaporkan kasus kekerasan tersebut. Penyuluhan, pembinaan dan Pembangunan keluarga menjadi penting untuk menurunkan angka kekerasan. Berikut data jumlah korban kekerasan didasarkan pada umur.

Tabel 36
Jumlah Korban Kekerasan Menurut Umur
Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 – 2021

Jenis Kelamin	2019	2020	2021
0–17	115	108	126
18–24	30	28	57
25 Tahun keatas	84	88	73
Jumlah	229	224	256

Sumber: UPTD PPA Kab. Bantul

Pada data ini disajikan berdasarkan 3 kelompok umur, antara 0-17 tahun untuk usia anak, 18-24 tahun untuk usia remaja dan 25 tahun ke atas pada usia dewasa. Dari ketiga kelompok umur tersebut dapat dilihat bahwa korban kekerasan terbanyak di kelompok usia anak-anak. Di usia ini sangat rentan terjadi kekerasan karena mereka masih anak-anak dan tidak mempunyai cukup kekuatan untuk berdiri sendiri. Kekerasan dapat terjadi dalam lingkungan rumah, sekolah juga saat pacaran. Kasus terbanyak selanjutnya dialami oleh kelompok usia dewasa, 25 tahun ke atas, dimana usia ini biasanya masuk dunia perkawinan dimana seseorang mulai membangun sendiri keluarganya. Sementara remaja menjelang dewasa mengalami paling sedikit kekerasan. Di usia ini anak sudah mulai mempunyai kehidupannya sendiri, kuliah atau bekerja. Sehingga otoritas akan dirinya sangatlah kental. Namun demikian perempuan tetap rentan menjadi korban kekerasan di semua kelompok umur.



Gambar 37
Jumlah Korban Kekerasan Menurut Umur
Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 – 2021

Lokus kekerasan terjadi baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja maupun di tempat umum. Rumah dan sekolah yang mestinya menjadi tempat paling aman justru menjadi tempat terjadinya kekerasan terbanyak. Jenis kekerasan yang terjadi sebagaimana terlihat pada grafik berikut paling banyak adalah kekerasan psikis, fisik, dan kekerasan seksual, juga penelantaran. Fungsi keluarga yang tidak berjalan semestinya, pembagian peran yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan, relasi kuasa dalam rumah tangga yang tidak setara ditengarai menjadi pemicu terjadinya kekerasan.

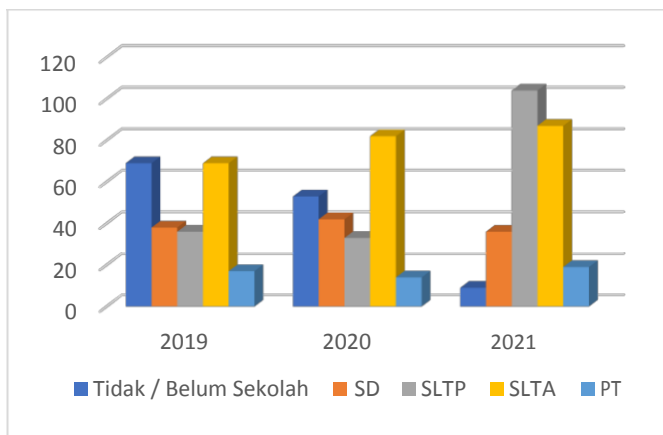
C. Jumlah Kekerasan Menurut Pendidikan

Kekerasan terjadi tidak saja di semua kelompok usia tetapi juga di semua jenjang pendidikan. Korban kekerasan terbanyak dan cukup signifikan peningkatannya dialami pada jenjang SLTP, dimana usia ini adalah usia remaja muda. Disusul jenjang SLTA, yang mendominasi kekerasan yang terjadi.

Tabel 37
Jumlah Kekerasan Menurut Pendidikan
Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 – 2021

Pendidikan	2019	2020	2021
Tidak / Belum Sekolah	69	53	9
SD	38	42	36
SLTP	36	33	104
SLTA	69	82	87
PT	17	14	19
Jumlah	229	224	255

Sumber: UPTD PPA Kab. Bantul



Gambar 38
Jumlah Kekerasan Menurut Pendidikan
Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021

Banyak tantangan dalam menyelesaikan kasus kekerasan ini, diantaranya adalah persepsi tentang kekerasan baik oleh anak, orang tua ataupun guru. Pun di dalam masyarakat kita dimana kekerasan dianggap sesuatu yang normal, lumrah dan diperbolehkan. Selain itu adanya relasa yang timpang baik itu karena jenis kelamin, rentang usia maupun kedudukan sosial. Untuk saat ini media sosial yang membanjiri dengan beragam informasi dan literasi media masyarakat kita masih minim. Penyelesaian kasus kekerasan ini sangat penting dan harus selesai hingga tuntas sehingga dapat memutus rantai kekerasan berikutnya. Kalau sampai tidak tuntas korban kekerasan akan menganggap hal ini wajar dan berikutnya dapat menjadi pelaku kekerasan.

D. Jumlah Kekerasan Menurut Jenis Kekerasan

Berdasarkan jenis kekerasan di Kabupaten Bantul pada tahun 2021, tidak terjadi kasus eksploitasi/trafficking dan lainnya. Jenis kekerasan terbanyak adalah kekerasan seksual sebanyak 38,04%, disusul kekerasan fisik sebanyak 28,23 % mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, kekerasan psikis sebesar 27,06%, dan penelantaran sebesar 6,6%. Peningkatan terbesar pada tahun 2021 terjadi pada kekerasan seksual yang mengalami pelonjakan yang cukup besar. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi di luar saja, tetapi banyak terjadi di lingkungan keluarga dekat. Dengan adanya UU baru Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan mampu menekan angka kekerasan seksual, mengingat sanksinya cukup berat bagi pelaku.

Tabel 38
Jumlah Kekerasan Menurut Jenis Kekerasan
Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 – 2021

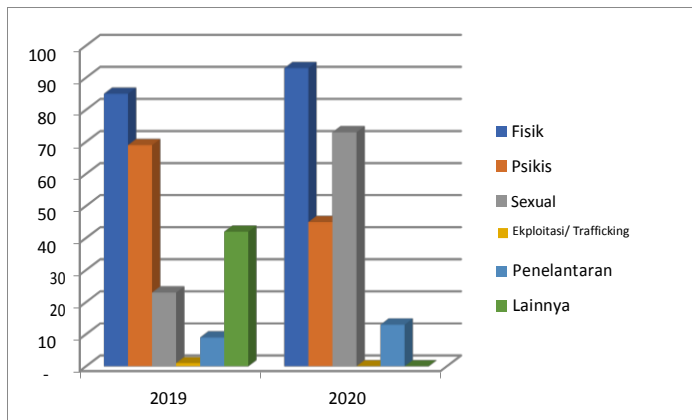
Jenis Kelamin	2019	2020	2021
Fisik	85	93	72
Psikis	69	45	69
Sexual	23	73	97
Eksploitasi/ Trafficking	1	-	-
Penelantaran	9	13	17
Lainnya	42	-	-
Jumlah	229	224	255

Sumber: Dinas Sosial Kab. Bantul

Jumlah Kekerasan di Kabupaten Bantul perlu menjadi perhatian, apalagi di tahun 2021 mengalami peningkatan. Pidana yang cukup berat bagi

pelaku kekerasan dalam bentuk apapun terutama bagi pelaku kekerasan fisik dan seksual belum mampu membuat efek jera.

Adanya Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak, mendorong masyarakat untuk melakukan pengaduan kejadian kekerasan yang dialami atau yang ada di sekitarnya. Berdasarkan jumlah korban kekerasan, jenis dan kelompok usianya, mayoritas kejadian kekerasan dialami oleh perempuan dalam bentuk kekerasan fisik, psikis dan seksual. Hal ini menjadi sangat memprihatinkan, ketika kekerasan yang terjadi tidak segera dilaporkan, atau kejadian menimpa sejak korban masih anak-anak, atau sudah lama terjadi. Kebanyakan korban memilih diam atas kejadian yang dialami karena dilakukan oleh orang-orang terdekat.



Gambar 39

Jumlah Kekerasan Menurut Jenis Kekerasan
Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021

Perlu menjadi perhatian adalah kerja lintas sektor baik dalam bidang pendidikan, terkait dengan risiko kekerasan terhadap anak bisa terjadi di ranah pendidikan, sebagai pihak yang turut bertanggung jawab dalam perlindungan anak. Demikian pula pola asuh anak dalam keluarga, serta lintas sektor lainnya perlu bekerja sama dalam pencegahan dan penanganan kejahatan luar biasa ini. Dalam hal ini Bantul perlu mengembangkan sistem data kekerasan perempuan dan anak menjadi lebih komprehensif dan masif. Rencana aksi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan perlu direview kembali.

BAB VIII DATA DAN STATISTIK ANAK

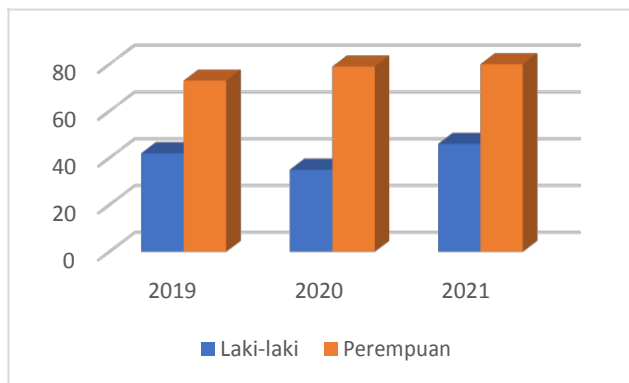
A. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak (usia 0-18 tahun) adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan pada anak secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi. Jumlah ini didapatkan dari laporan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak dari lembaga yang memberikan layanan terhadap Korban Kekerasan Perempuan dan anak. Pengelompokan Kabupaten/Kota adalah berdasarkan letak lembaga pemberi layanan terhadap korban bukan menunjukkan domisili korban atau tempat kejadian kasus.

Tabel 39
Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak
Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021

Jenis Kelamin	2019	2020	2021
Laki-laki	42	35	46
Perempuan	73	79	80
Jumlah	115	114	126

Sumber: UPTD PPA Kab. Bantul



Gambar 40
Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak
Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 - 2021

Di Kabupaten Bantul kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan pada tahun 2020. 6 Dan ironisnya 63,5% dialami oleh anak perempuan. Perempuan masih dalam posisi lemah dan subordinat bagi kaum laki laki. Dalam tiga tahun terakhir korban kekerasan banyak dialami oleh anak perempuan.

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dengan melibatkan posyandu, dasa wisma, kelompok siskamling, karang taruna untuk deteksi dini dan pengawasan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak dan perempuan. Untuk itu penting dibangun kesepahaman dan pengetahuan tentang “kekerasan” kepada seluruh masyarakat, utamanya para kader PATBM dan kelompok masyarakat seperti tersebut diatas.

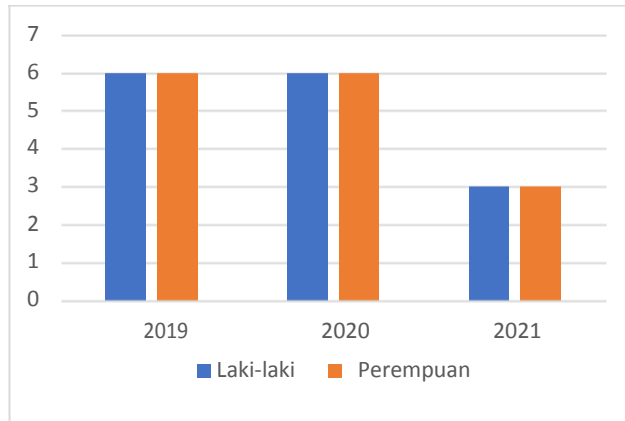
B. Jumlah Anak Jalanan

Pada tahun 2021 jumlah anak jalanan mengalami penurunan. Pilihan untuk hidup di jalan, salah satunya disebabkan oleh lemahnya fungsi keluarga, seperti anak memang memilih hidup di jalan karena konflik internal keluarga, pengaruh kawan sebaya, faktor ekonomi, penelantaran, ataupun tidak punya keluarga dekat. Keberadaan anak hidup di jalan juga menjadi petunjuk awal kemungkinan terjadinya trafficking. Media sosial ditengarai menjadi modus baru trafficking, baik yang dilakukan oleh anak maupun orang dewasa. Hal ini perlu penelitian lebih lanjut dan penyikapan yang lebih arif tentang penggunaan media sosial.

Tabel 40
Anak Jalanan Kabupaten Bantul
Tahun 2019 - 2020 - 2021

Anak Jalanan	2019	2020	2021
Laki-laki	6	6	3
Perempuan	6	6	3
Jumlah	12	12	6

Sumber: Dinas Sosial Kab. Bantul



Gambar 41
Anak Jalanan Kabupaten Bantul
Tahun 2019 - 2020 – 2021

C. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai kebutuhan khusus karena kedifabelannya. Kebutuhan anak berbeda dengan anak lainnya sehingga perlu mendapat perhatian dan program khusus.

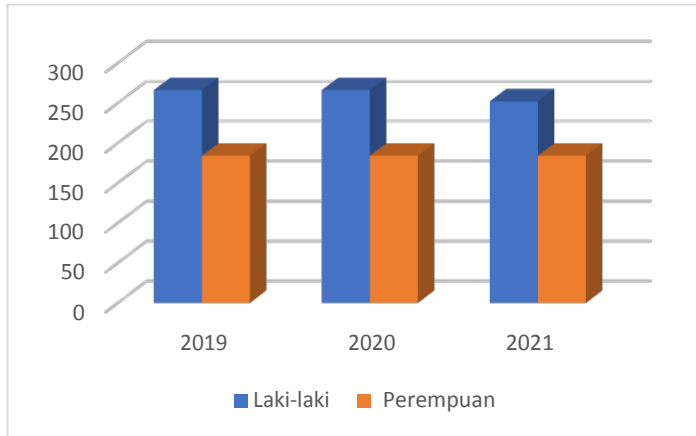
Tabel 41
Jumlah Anak Dengan Kedisabilitas Kabupaten Bantul
Tahun 2019 - 2020 - 2021

Jenis Kelamin	2019	2020	2021
Laki-laki	266	266	252
Perempuan	184	184	184
Jumlah	450	450	436

Sumber: Pengolahan data Dinas Sosial Kab. Bantul

Jumlah anak laki-laki berkebutuhan khusus lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan. Ini adalah perkara serius dimana anak berkebutuhan khusus memerlukan tindakan yang berbeda sesuai dengan kekhususannya. Setiap anak berhak mendapatkan hak-haknya tanpa syarat sehingga apapun kondisinya hak anak tetap harus diberikan tanpa syarat. Dan hak ini menjadi kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan dasar anak berkebutuhan khusus.

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah jumlah anak yang membutuhkan khusus yang tercatat belajar di sekolah di bawah Dinas Pendidikan. ABK semakin menjadi perhatian pemerintah dengan mengembangkan sekolah inklusi. Sekolah inklusi ini menggunakan pendekatan berbasis kebutuhan individu siswa. Namun pendidikan inklusif masih terkendala ketersediaan guru pendamping khusus, juga kemampuan guru reguler dalam menghadapi Anak Berkebutuhan khusus di kelas.



Gambar 42
Jumlah Anak Dengan Kedisabilitasn Kabupaten Bantul
Tahun 2019 - 2020 - 2021

D. Anak Miskin yang Memperoleh Beasiswa

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk anak-anak miskin dimana tidak mempunyai kemampuan untuk bersekolah diwujudkan dengan pemberian beasiswa. Beasiswa ini diberikan kepada anak-anak usia sekolah yang tidak mampu. Data tahun 2020 dan 2021 tentang beasiswa untuk anak miskin tidak dapat diperoleh sehingga tidak dapat dianalisis. Prinsipnya tidak ada anak yang tidak bersekolah karena faktor biaya diharapkan bisa ditekan dengan program beasiswa ini. Program ini memastikan semua anak di Kabupaten Bantul dapat mengenyam bangku sekolah.